PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2019

GERBANG RAJA II

Kutai Kartanegara Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis

BAB II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dan Indikator Kinerja Utama

BAB III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

BAB IV Penutup

Lampiran memuat Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Pelaporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 juga disajikan dalam website https://humas.kukarkab.go.id pada menu LKjIP. Selanjutnya dalam laporan ini telah kami sempurnakan analisis efisiensi penggunaan anggaran secara lebih mendalam.

Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus disempurnakan akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik. Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan instansi lain serta masyarakat sehingga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat dengan predikat B selama tiga tahun terakhir, bisa menjadi predikat A di Tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, peningkatan akuntabilitas kinerja mampu mempercepat perwujudan masyarakat Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan pada Tahun 2021.

Akhirul kalam. Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Tenggarong, Maret 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

DRS. EDI DAMANSYAH,M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 atas perencanaan kinerja dan melakukan pengukuran pada 29 sasaran dan 48 Indikator Kinerja Utama yang rata-rata hasil capainnya adalah ***174,37%*** dengan kriteria ***"SANGAT BERHASIL"***, dengan rincian sebanyak 24 Sasaran Kategori Sangat Berhasil, 1 Sasaran Kategori Berhasil, dan 4 sasaran Kategori Kurang Berhasil.

Hasil pengukuran masing-masing sasaran telah dianalisis, yaitu membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, dijelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi kalimantan Timur dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian juga disajikan program realisasi anggaran yang mendukung realisasi sasaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi sebesar **Rp. 22.945.205.054,60**. Efisiensi diperoleh dari hasil negosiasi dalam pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 29 sasaran menunjukkan 18 (delapan belas) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, dan 11 sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%, walau sebanyak 7 sasaran yang tidak mencapai target penyerapan anggaran lebih rendah dari capian kinerja, dan terdapat 4 sasaran yang penyerapan anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

Rekomendasi dari Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi kalimantan Timur atas evaluasi penyelenggaeaan SAKIP tahun 2018, telah, dalam proses tindaklanjut, dan telah direncanakan tindak lanjut perbaikan pada tahun 2019 dan 2020.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan dan memperoleh predikat “B”, nilai 6,89.

Kemudian sebagai bentuk evaluasi atas kinerja dan indikator kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilakukan reviu pada tahun 2019, maka penetapan kinerja tahun 2020 juga telah dilakukan reviu untuk disesuaikan dengan perubahan pada RPJMD serta dalam rangka menyelaraskan indikator kinerja OPD penangung jawab indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menghasilkan kinerja berupa penghargaan skala provinsi dan nasional berjumlah 10 (sepuluh) buah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GRAFIK		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Potensi Daerah	2
	C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4
	D. Perangkat Daerah	5
	E. Sumber Daya Aparatur	7
	F. Sumber Daya Keuangan	9
	G. Isu Strategis	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	A. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	14
	B. Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	15
	C. Tujuan Pembangunan Daerah	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	A. Pengukuran Kinerja	21
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	26
	1 Analisis Kinerja Sasaran 1	26
	2 Analisis Kinerja Sasaran 2	37
	3 Analisis Kinerja Sasaran 3	44
	4 Analisis Kinerja Sasaran 4	47
	5 Analisis Kinerja Sasaran 5	49
	6 Analisis Kinerja Sasaran 6	55
	7 Analisis Kinerja Sasaran 7	59
	8 Analisis Kinerja Sasaran 8	62
	9 Analisis Kinerja Sasaran 9	69
	10 Analisis Kinerja Sasaran 10	71
	11 Analisis Kinerja Sasaran 11	76
	12 Analisis Kinerja Sasaran 12	81
	13 Analisis Kinerja Sasaran 13	84
	14 Analisis Kinerja Sasaran 14	89
	15 Analisis Kinerja Sasaran 15	92
	16 Analisis Kinerja Sasaran 16	95
	17 Analisis Kinerja Sasaran 17	98
	18 Analisis Kinerja Sasaran 18	102
	19 Analisis Kinerja Sasaran 19	105
	20 Analisis Kinerja Sasaran 20	108
	21 Analisis Kinerja Sasaran 21	114
	22 Analisis Kinerja Sasaran 22	116
	23 Analisis Kinerja Sasaran 23	118
	24 Analisis Kinerja Sasaran 24	121
	25 Analisis Kinerja Sasaran 25	124
	26 Analisis Kinerja Sasaran 26	126
	27 Analisis Kinerja Sasaran 27	131
	28 Analisis Kinerja Sasaran 28	135
	29 Analisis Kinerja Sasaran 29	138
	C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	147

	D. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	150
BAB IV	PENUTUP	154
LAMPIRAN		x
	Daftar Prestasi dan Penghargaan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara	
	Pernyataan Reviu LKjIP Tahun 2018 dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator serta Kondisi Awal dan Kondisi Akhir	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	23
Tabel 3.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	25
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2019	26
Tabel 3.4	IKM RSUD. A.M. Parikesit Tahun 2019	28
Tabel 3.5	Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi Arnstein	30
Tabel 3.6	Tingkat Partisipasi Masyarakat per Kecamatan Tahun 2019	31
Tabel 3.7	Tingkat Partisipasi Masyarakat per Kecamatan Tahun 2019	32
Tabel 3.8	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	32
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD	33
Tabel 3.10	Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2019	34
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2019	37
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD	42
Tabel 3.13	Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2019	42
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2019	44
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD	45
Tabel 3.16	Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2019	45
Tabel 3.17	Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2019	47
Tabel 3.18	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD	48
Tabel 3.19	Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2019	48
Tabel 3.20	Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2019	49
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD	52
Tabel 3.22	Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2019	53
Tabel 3.23	Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2019	55
Tabel 3.24	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD	57
Tabel 3.25	Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2019	57
Tabel 3.26	Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2019	59
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD	60
Tabel 3.28	Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2019	60
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2019	62
Tabel 3.30	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD	66
Tabel 3.31	Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2019	66
Tabel 3.32	Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2019	69
Tabel 3.33	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD	70
Tabel 3.34	Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2019	70
Tabel 3.35	Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2019	71
Tabel 3.36	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD	73
Tabel 3.37	Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2019	74
Tabel 3.38	Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2019	76
Tabel 3.39	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD	79
Tabel 3.40	Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2019	79
Tabel 3.41	Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2019	81
Tabel 3.42	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD	82
Tabel 3.43	Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2019	82
Tabel 3.44	Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2019	84
Tabel 3.45	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD	87
Tabel 3.46	Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2019	87
Tabel 3.47	Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2019	89
Tabel 3.48	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD	90
Tabel 3.49	Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2019	90
Tabel 3.50	Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2019	92
Tabel 3.51	Rincian Realisasi Komponen Pembentuk PAD Tahun 2019	92

Tabel 3.52 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD..... 94
Tabel 3.53 Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2019..... 94
Tabel 3.54 Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2019..... 95
Tabel 3.55 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD..... 96
Tabel 3.56 Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2019..... 96
Tabel 3.57 Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2019..... 98
Tabel 3.58 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 terhadap target RPJMD..... 98
Tabel 3.59 Program dan Anggaran Sasaran 17 Tahun 2019..... 99
Tabel 3.60 Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2019..... 102
Tabel 3.61 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 terhadap target RPJMD..... 103
Tabel 3.62 Program dan Anggaran Sasaran 18 Tahun 2019..... 103
Tabel 3.63 Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2019..... 105
Tabel 3.64 Rekapitulasi Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Tahun 2018 s/d 2019..... 105
Tabel 3.65 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 terhadap target RPJMD..... 106
Tabel 3.66 Program dan Anggaran Sasaran 19 Tahun 2019..... 107
Tabel 3.67 Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2019..... 108
Tabel 3.68 Data Jumlah Koperasi Tahun 2019..... 109
Tabel 3.69 Perkembangan UKM sesuai klasifikasi usaha..... 110
Tabel 3.70 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 terhadap target RPJMD..... 111
Tabel 3.71 Program dan Anggaran Sasaran 20 Tahun 2019..... 111
Tabel 3.72 Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2019..... 114
Tabel 3.73 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 terhadap target RPJMD..... 115
Tabel 3.74 Program dan Anggaran Sasaran 21 Tahun 2019..... 115
Tabel 3.75 Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2019..... 116
Tabel 3.76 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 terhadap target RPJMD..... 116
Tabel 3.77 Program dan Anggaran Sasaran 22 Tahun 2019..... 117
Tabel 3.78 Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2019..... 118
Tabel 3.79 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 terhadap target RPJMD..... 118
Tabel 3.80 Program dan Anggaran Sasaran 23 Tahun 2019..... 119
Tabel 3.81 Realisasi Indikator Sasaran 24 Tahun 2019..... 121
Tabel 3.82 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 24 terhadap target RPJMD..... 122
Tabel 3.83 Program dan Anggaran Sasaran 24 Tahun 2019..... 122
Tabel 3.84 Realisasi Indikator Sasaran 25 Tahun 2019..... 124
Tabel 3.85 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 25 terhadap target RPJMD..... 125
Tabel 3.86 Program dan Anggaran Sasaran 25 Tahun 2019..... 125
Tabel 3.87 Realisasi Indikator Sasaran 26 Tahun 2019..... 126
Tabel 3.88 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 26 terhadap target RPJMD..... 129
Tabel 3.89 Program dan Anggaran Sasaran 26 Tahun 2019..... 129
Tabel 3.90 Realisasi Indikator Sasaran 27 Tahun 2019..... 131
Tabel 3.91 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 27 Tahun 2019..... 131
Tabel 3.92 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 27 terhadap target RPJMD..... 133
Tabel 3.93 Program dan Anggaran Sasaran 27 Tahun 2019..... 133
Tabel 3.94 Realisasi Indikator Sasaran 28 Tahun 2019..... 135
Tabel 3.95 Data Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan tahun 2019. 135
Tabel 3.96 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 28 terhadap target RPJMD..... 136
Tabel 3.97 Program dan Anggaran Sasaran 28 Tahun 2019..... 136
Tabel 3.98 Realisasi Indikator Sasaran 29 Tahun 2019..... 138
Tabel 3.99 Realisasi bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2019..... 141
Tabel 3.100 Data Terpilah Kekerasan terhadap perempuan di Tahun 2019..... 142
Tabel 3.101 Data Terpilah Kekerasan terhadap anak di Tahun 2019..... 143
Tabel 3.102 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 29 terhadap target RPJMD..... 144
Tabel 3.103 Program dan Anggaran Sasaran 29 Tahun 2019..... 145
Tabel 3.104 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019..... 147
Tabel 4.1 Rekapitulasi Capaian Sasaran..... 154

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Predikat LPPD	27
Grafik 3.2	Nilai LPPD Sementara Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur	28
Grafik 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	29
Grafik 3.4	Indeks Persepsi Korupsi	39
Grafik 3.5	Indeks Persepsi Korupsi	39
Grafik 3.6	AHH, AKI, AKB	65
Grafik 3.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019	85
Grafik 3.8	PAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019	93
Grafik 3.9	Persentase Koperasi Aktif 2013 s/d 2019	109
Grafik 3.10	Pertumbuhan Tingkat Kelas UKM Tahun 2019	110
Grafik 3.11	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 s/d 2019	139
Grafik 3.12	Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 s/d 2019	140
Grafik 3.13	Realisasi bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2019	141
Grafik 3.14	Kekerasan Terhadap Perempuan di Tahun 2019	143
Grafik 3.15	Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2019	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

(1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016, kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,

(2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai dasar rencana pembangunan tahun 2019; dan

(3) Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Kutai kartanegara Tahun 2019.

Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja Tahun 2019 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

B. Potensi Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak diantara 115^{o}26’28” Bujur Timur/Longitude East 117^{o}36’43” Bujur Timur/Longitude East 1^{o}28’21” Lintang Utara/Latitude North 1^{o}08’ 06” Lintang Selatan/Latitude South. Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Sebelah Timur : Selat Makasar. Sebelah Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Barat. Selain dari itu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengelilingi wilayah Kota Samarinda.

Luas Kabupaten Kutai Kartanegara 27.263,10 Km^{2}, yang terbagi atas 18 kecamatan dengan luas wilayah sebagai berikut :

Luas wilayah berdasarkan kecamatan

Kecamatan	*Luas (Km^2)*
1.Samboja	*1,045.90*
2.Muara Jawa	*754.50*
3.Sanga-Sanga	*233.40*
4.Loa Janan	*644.20*
5.Loa Kulu	*1,405.70*
6.Muara Muntai	*928.60*
7.Muara Wis	*1,108.16*
8.Kota Bangun	*1,143.74*
9.Tenggarong	*398.10*
10.Sebulu	*859.50*
11.Tenggarong Seberang	*437.00*
12.Anggana	*1,798.80*
13.Muara Badak	*939.09*
14.Marang Kayu	*1,165.71*
15.Muara Kaman	*3,410.10*
16.Kenohan	*1,302.20*
17.Kembang Janggut	*1,923.90*
18.Tabang	*7,764.50*
Total	*27,263.10*

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2017

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara

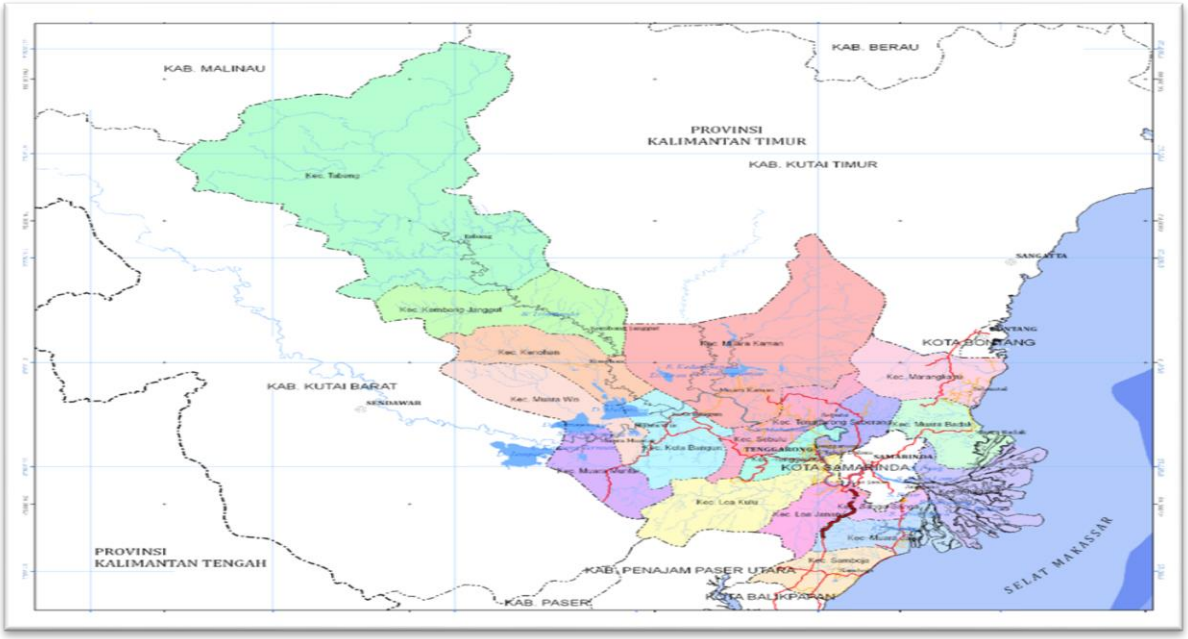

Dengan jumlah penduduk mencapai 626.286 jiwa (sensus 2010), dan berdasarkan perekaman data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan semester II tahun 2019 sebanyak 696.784 jiwa. Secara administratif Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 18 wilayah kecamatan, 225 desa/kelurahan.

C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan nomenlatur sebagai berikut:

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
   1) pendidikan;
   2) kesehatan;
   3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
   4) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
   5) sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
   1) tenaga kerja;
   2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   3) pangan;
   4) pertanahan;
   5) lingkungan hidup;
   6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) perhubungan;
10) komunikasi dan informatika;
11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12) penanaman modal;
13) statistik;
14) persandian;
15) kebudayaan;
16) perpustakaan; dan
17) kearsipan.

c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

Di samping itu juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

D. Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat daerah Kabupaten Kutai kartanegara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 58 perangkat daerah, yaitu:

	Nama Perangkat Daerah		Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah	30	Dinas Perkebunan
2	Sekretariat DPRD	31	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
3	Inspektorat	32	Dinas Pertanian Dan Peternakan
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	33	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34	Dinas Sosial
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
7	Badan Pendapatan Daerah	36	RSUD. A.M. Parikesit
8	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	37	RSUD. Abadi Samboja
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	38	RSUD. Dayaku Raja Kota Bangun
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	40	Sekretariat KORPRI
12	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	41	Kecamatan Anggana
13	Dinas Kelautan Dan Perikanan	42	Kecamatan Kembang Janggut
14	Dinas Pemuda Dan Olahraga	43	Kecamatan Kenohan
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	44	Kecamatan Kota Bangun
16	Dinas Kesehatan	45	Kecamatan Loa Janan
17	Dinas Ketahanan Pangan	46	Kecamatan Loa Kulu
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	47	Kecamatan Marang Kayu
19	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	48	Kecamatan Muara Badak
20	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	49	Kecamatan Muara Jawa
21	Dinas Pariwisata	50	Kecamatan Muara Kaman
22	Dinas Pekerjaan Umum	51	Kecamatan Muara Muntai
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	52	Kecamatan Muara Wis
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	53	Kecamatan Samboja
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54	Kecamatan Sanga Sanga
26	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	55	Kecamatan Sebulu
27	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	56	Kecamatan Tabang
28	Dinas Perhubungan	57	Kecamatan Tenggarong
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	58	Kecamatan Tenggarong Seberang

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2019 sebanyak 14.001 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	71	11	82	0,59%
2	SLTP	197	53	250	1,79%
3	SLTA	3209	2295	5504	39,31%
4	SARJANA MUDA	3	2	5	0,04%
5	D-I	117	131	248	1,77%
6	D-II	460	623	1083	7,74%
7	D-III	258	524	782	5,59%
8	D-IV	57	44	101	0,72%
9	S1	2571	2826	5397	38,55%
10	S2	359	183	542	3,87%
11	S3	7	0	7	0,05%
Jumlah		7309	6692	14001	100,00%

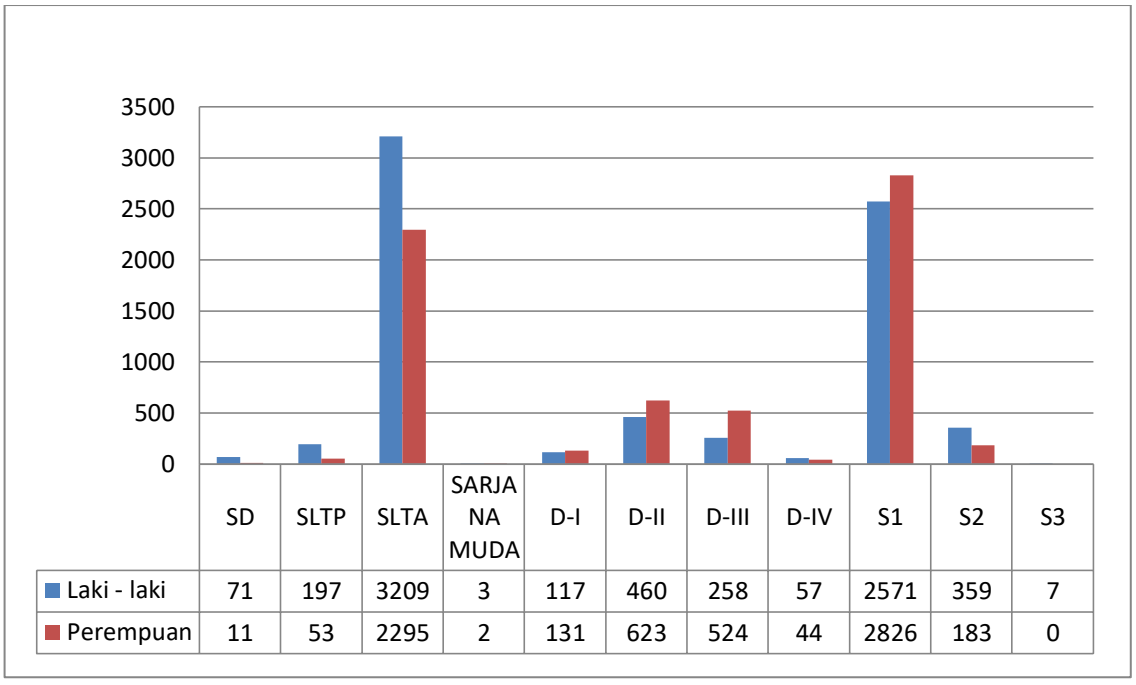

b. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1.	I	123	27	150	1,07%
2.	II	2759	1778	4537	32,40%
3.	III	2918	3548	6466	46,18%
4.	IV	1509	1339	2848	20,34%
	Jumlah	7309	6692	14001	100,00%

c. Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	1	0	1	0,07%
2	II.b	33	4	37	2,68%
3	III.a	60	12	72	5,22%
4	III.b	134	27	161	11,68%
5	IV.a	565	216	781	56,64%
6	IV.b	220	107	327	23,71%
Jumlah		**1013**	**366**	**1379**	**100,00%**

d. Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	1013	366	1379	9,85%
2	Fungsional Umum	3555	2283	5838	41,70%
3	Fungsional Tertentu	2741	4043	6784	48,45%
Jumlah		**7309**	**6692**	**14001**	**100,00%**

F. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Kode. Rek	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
1	***Pendapatan***	***5.002.311.146.451,00***	***4.932.574.566.347,63***	***(69.736.580.103,37)***	***(1,39)***
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	377.030.636.809,00	391.645.109.320,43	14.614.472.511,43	3,88
1 . 2	Dana Perimbangan	3.902.216.735.642,00	3.667.702.503.437,02	(234.514.232.204,98)	(6,01)
1 . 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	723.063.774.000,00	873.226.953.590,18	150.163.179.590,18	20,77
2	***Belanja***	***5.105.955.650.300,33***	***5.494.776.456.337,06***	***388.820.806.036,73***	***7,62***
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	2.511.191.124.750,00	2.481.042.340.225,01	(30.148.784.524,99)	(1,20)
2 . 2	Belanja Langsung	2.594.764.525.550,33	3.013.734.116.112,05	418.969.590.561,72	16,15
	Surplus / (Defisit)	***(103.644.503.849,33)***	***(562.201.889.989,43)***	***(458.557.386.140,10)***	***442,43***
3	Pembiayaan Daerah				
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	108.144.503.849,33	591.701.889.989,43	483.557.386.140,10	447,14
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	108.144.503.849,33	591.701.889.989,43	483.557.386.140,10	447,14
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.500.000.000,00	29.500.000.000,00	25.000.000.000,00	555,56
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	29.500.000.000,00	25.000.000.000,00	555,56
	Pembiayaan Netto	***103.644.503.849,33***	***562.201.889.989,43***	***458.557.386.140,10***	***442,43***

G. Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah maka **isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara** adalah sebagai berikut:

1. **Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah**

   Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangasung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kab.Kutai Kartanegara merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga lebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

2. **Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah**

   Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,

ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik di tata pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah perubahan *mindset* dan *cultureset* serta pengembangan budaya kerja yang berintegritas. Pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Hal ini memberikan harapan yang besar kepada masyarakat pada pemerintah, agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal serta mampu membentuk pemerintahan yang bersih. Sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

3. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Dan Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan masyarakat dapat bekerja pada sektor yang berpendapatan tinggi sehingga bisa mengangkat derajat dan martabat keluarga serta mampu meminimalisir terjadinya kemiskinan. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan *crucial problem*. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada

pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat terwujud pada seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Peningkatan Pengelolaan PAD Dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu faktor paling penting dalam menilai serta menyatakan kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, dan melaksanakan pembangunan daerahnya.Kemampuan pembiayaan merupakan variabel penting dalam menilai kemampuan otonomi, dimana kondisi kemampuan pembiayaan yang sangat rendah dapat menyebabkan ketergantungan antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini yang sedang terjadi pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri. Meskipun begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Pemberian dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan yang optimal yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun dalam realisasinya pemerintah daerah kerap lengah dalam mengelola pembiayaan daerah. Dengan hal ini pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri. Usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber Pendapatan Asli

Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memerhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

5. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Beberapa sektor yang berkembang dengan baik dan menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Sektor-sektor ini merupakan potensi unggulan sumber daya daerah Kutai Kartanegara. Dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam, pemerintah daerahharus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dari terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera meningkatkan produksi dan mengembangkan berbagai inovasi agar hasil pertanian dapat dikelola untuk memingkatkan nilai tambah produk. Dengan mempercepat pergerakan perekonomian daerah maka perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan percepatan pembangunan sektor pertanian arti luas diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi mengembangkan produk unggulan daerah. Sehingga dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil/dimanfaatkan. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021adalah:

A. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

MAJU : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

MANDIRI : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki (ekonomi,

sosial, budaya, sumber daya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

SEJAHTERA : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

B. Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

C. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani;
2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia;
3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah;
5. Menurunkan kesenjangan pem-bangunan antar wilayah;
6. Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.

Penjabaran misi dalam tujuan pembangunan daerah termasuk indikator serta Kondisi Awal dan Kondisi Akhir disajikan dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator serta Kondisi Awal dan Kondisi Akhir

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT			
T1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66.78)	BB (70.2)
MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BEROMPETEN			
T2: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia	IPM	72,19	73,75
MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
T3: Menuju kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi	Derajat Otonomi Fiskal	6.08%	11.34%

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH			
T4: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah	LPE (Non Migas dan Batu Bara)	1,73	6,11
MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH			
T5: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0,33	0,26
MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
T6: Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.79	69.67
MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK			
T7: Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	IPG	77.88%	80.09%

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahannya Tahun 2019, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 yang ditandatangani Bupati Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 :

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	1	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,3800
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00 (sangat baik)
		3	Indeks Partisipasi Masyarakat	83.00 (Sangat Baik)
2	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	4	Opini BPK	WTP
		5	Indek Persepsi Korupsi	6.3
		6	Predikat Akuntabilitas Kinerja	81
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	7	Cakupan e-KTP	96%
4	Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	8	Peserta KB Aktif	73,91%
5	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	9	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk	148
		10	Indeks Risiko Bencana	130
6	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	11	Angka Harapan Lama Sekolah	14,89
		12	Rata-Rata Lama Sekolah	9.27
7	Meningkatnya budaya baca masyarakat	13	Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan	3,93%
8	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	14	Angka Harapan Hidup	71,72
		15	Angka Kematian Ibu Melahirkan	25
		16	Angka Kematian Bayi	168
9	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	17	Rasio Kesempatan Kerja	0,98
10	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	18	Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri	4%
		19	Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index)	60%

11	Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	20	Jumlah Desa Berketahanan Sosial	150
		21	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal	60%
		22	Indeks Kemandirian Desa	0,72
12	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	23	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55%
13	Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah		Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,41
		24	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,03
		26	Cakupan Rumah Layak Huni	92,12
14	Meningkatnya daya saing investasi daerah	27	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	5,6%
15	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	28	Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)	8,97%
16	Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	29	Cakupan Fasilitasi CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)	10%
17	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	30	Pertumbuhan sektor pertanian	9,24%
18	Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	31	Pertumbuhan sektor pariwisata	7,89%
19	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	32	Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya	3%
20	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	33	Persentase koperasi aktif	81,23%
		34	Pertumbuhan UMK Naik Kelas	3,13%
21	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	35	Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara	9%
22	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	36	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,03%

23	Meningkatnya interkoneksitas antar wilayah	37	Persentase jalan dengan kondisi baik	86,8%
24	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	38	Cakupan aksesbilitas antar wilayah	75,00%
25	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	39	Cakupan koneksi internet Kecamatan/Desa/Kel	80%
26	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	40	Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	1 Kawasan
		41	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	0%
		42	Persentase cakupan layanan air minum Rumah Tangga	100%
27	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,00
28	Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	44	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan.	3,89%
29	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	45	IPG	86%
		46	IDG	56,29%
		47	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh pertugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%
		48	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	130 (-15%)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target - Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal.** Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI	KET
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil	(SB)
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	(B)
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	(CB)
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	(KB)

Tabel 3.1. Skala Ordinal Pengukuran Sasaran

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja

organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian (%)	< 55	55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
1.	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka	3	101,18				Sangat Berhasil
2.	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	3	89,45				Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	1	102,76				Sangat Berhasil
4.	Optimalnya pengendalian penduduk danpelayanan keluarga berencana	1	103,36				Sangat Berhasil
5.	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	2	146,97				Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	2	93,25				Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	1	135,88				Sangat Berhasil
8.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	3	101,76				Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	95,91				Sangat Berhasil
10.	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	2	166,42				Sangat Berhasil

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian (%)	< 55	55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
11.	Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	3	104,96				Sangat Berhasil
12.	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	1	129,09				Sangat Berhasil
13.	Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	3	-122,62	Kurang Berhasil			
14.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	1224,82				Sangat Berhasil
15.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	743,70				Sangat Berhasil
16.	Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	1	608,70				Sangat Berhasil
17.	Meningkatnya produktivitas, tata kelola,dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	1	51,84	Kurang Berhasil			
18.	Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	1	151,45				Sangat Berhasil
19.	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	1	72,33			Berhasil	
20.	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	2	97,83				Sangat Berhasil
21.	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	1	45,00	Kurang Berhasil			
22.	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	1	29,16	Kurang Berhasil			

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – Rata Capaian (%)	< 55	55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
23.	Meningkatnya interkoneksitas antar wilayah	1	101,16				Sangat Berhasil
24.	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	1	123,47				Sangat Berhasil
25.	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	1	103,90				Sangat Berhasil
26.	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	3	94,93				Sangat Berhasil
27.	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	1	108,18				Sangat Berhasil
28.	Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	1	152,44				Sangat Berhasil
29.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	4	99,39				Sangat Berhasil
JUMLAH		48					

Pencapaian kinerja 29 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No.	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Berhasil	24	82,76%
2.	Berhasil	1	3,45%
3.	Cukup Berhasil	-	-
4.	Kurang Berhasil	4	13,79%
Jumlah		29	100%

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1) Analisis Kinerja Sasaran 1: "Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur,dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah "

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur,dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah" dengan indikator Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Partisipasi Masyarakat mencapai **101,18%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Point	3,3800	3,2912 (Data Sementara)	97,37%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	83	88,075	106,11%
3.	Indeks Partisipasi Masyarakat	Point	83	83,06	100,07%
Rata – rata Capaian					101,18%

Sumber data: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD. A.M.Parikesit dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia masih dalam proses evaluasi, sehingga untuk menghitung capaian kinerja indikator Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan data Penetapan Status

dan Peringkat Kinerja Sementara Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2018.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 700/K.548/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Penetapan Status dan Peringkat Kinerja Sementara Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2018. Capaian kinerja tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu mengalami penurunan, namun hasil ini tidak bisa menjadi patokan, karena Nilai Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia belum keluar.

Grafik 3.1 Predikat LPPD

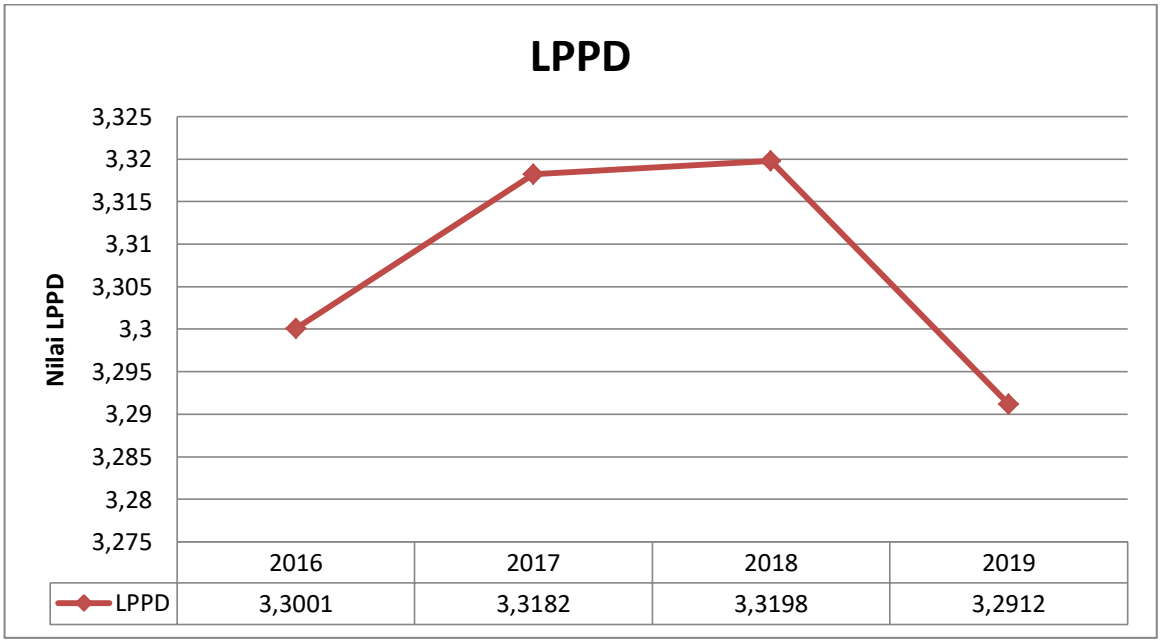

Sumber data: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 700/K.548/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Penetapan Status dan Peringkat Kinerja Sementara Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2018, Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan ke – 4 (empat) se Provinsi Kalimantan Timur, adapun penilaian sementara peringkat Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Grafik 3.2 Nilai LPPD Sementara Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur

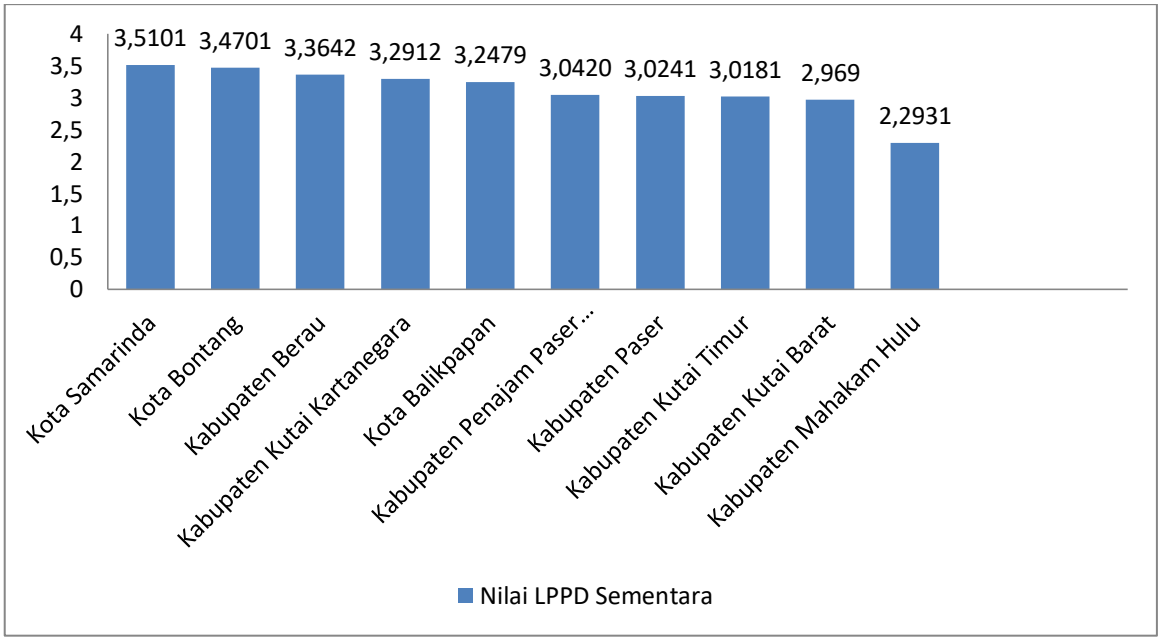

Sumber data: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di 2 (dua) Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik yaitu RSUD. AM Parikesit dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD. AM.Parikesit Tenggarong Tahun 2019. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan menggunakan lembar survei di 8 (delapan) Unit/ Instalasi Layanan:

Tabel 3.4 IKM RSUD. A.M. Parikesit Tahun 2019

NO.	Unit/ Instalasi	Capaian	Kinerja
1.	Instalasi Gawat Darurat	76,60%	Kurang Baik (C)
2.	Instalasi Rawat Inap 1	84,56%	Baik (B)
3.	Instalasi Rawat Inap 2	83,55%	Baik (B)
4.	Instalasi Rawat Jalan	83,06%	Baik (B)
5.	Instalasi Laboratorium	85,79%	Baik (B)
6.	Instalasi Radiologi	83,83	Baik (B)
7.	Instalasi Rehabilitasi Medik	86,32%	Baik (B)
8.	Instalasi Farmasi	79,46%	Baik (B)
TOTAL		82,90%	Baik (B)

Sumber data: RSUD. A.M.Parikesit

RSUD. AM. Parikesit secara keseluruhan merealisasikan IKM sebesar 82,90 %, dengan Mutu Pelayanan B (Kinerja baik).

Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2019, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,25 dengan Mutu Pelayanan A (Kinerja Sangat Baik)

Dari kedua Perangkat Daerah pelaksana survey Kepuasan Masyarakat yaitu RSUD. AM. Parikesit dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh nilai survey 82,90 + 93,25 = 176,15 dengan nilai rata-rata hasil survey IKM adalah **88,075**. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1,465 karena nilai tahun 2018 sebesar 86,61.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan dalam RPJMD pada Tahun 2019 sebesar 83, dengan realisasi 88,075 sehingga capaian kinerja sebesar 106,11%.

Grafik 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

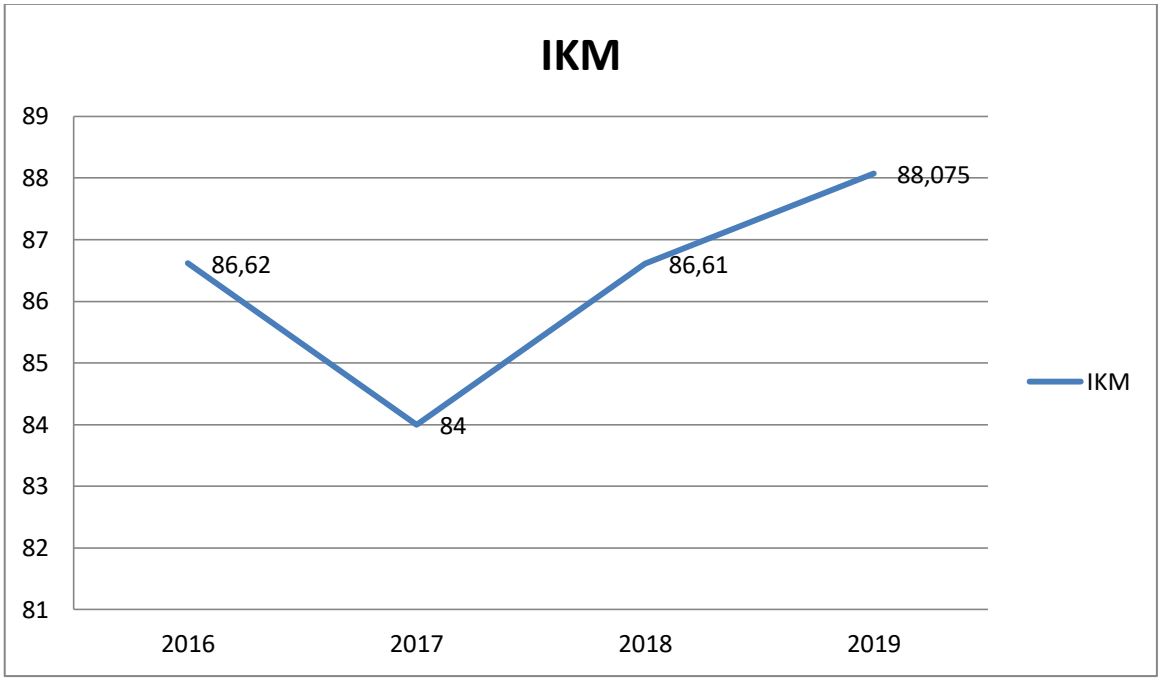

Sumber data: RSUD. A.M.Parikesit dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

3. Indeks Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi bagaian penting dalam masyarkat demokrasi. Dalam tata kelola pemerintahan keterlibatan publik dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan serta perencanaan pembangunan adalah faktor pendorong suksesnya sebuah pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara teori partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Gradasi peserta dapat digambarkan dalam Tabel 3.5 sebagai sebuah tangga dengan delapan tingkatan yang menunjukkan peningkatan partisipasi tersebut (Arnstein 1986 dalam Wicaksono 2010): Tabel Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi Arnstein :

Tabel 3.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi Arnstein

No.	Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
1.	Manipulasi (Manipulation)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
2.	Terapi (Therapy)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
3.	Pemberitahuan (Informing)	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	Tokenism/ sekedar justifikasi agar mengiyakan
4.	Konsultasi (Consultation)	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
5.	Penentraman (Placation)	Saran Masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6.	Kemitraan (Partnership)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7.	Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
8.	Kontrol Masyarakat	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Penelitian Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dilakukan di 18 (delapan belas) kecamatan. Dengan komponen yang diteliti adalah tingkat Akses, Kesadaran, Kontrol dan Manfaat. Adapun hasil Tingkat Partisipasi Masyarakat per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Tingkat Partisipasi Masyarakat per Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan		Nilai Komponen				Total Nilai	Konversi Nilai IPM
		Akses	Kesadaran	Kontrol	Manfaat		
1.	Samboja	22,87	18,83	22,53	20,77	85,00	1360,00
2.	Muara Jawa	22,59	18,47	20,56	19,66	81,28	1300,50
3.	Sanga-sanga	22,12	19,65	20,69	20,58	83,04	1328,64
4.	Anggana	21,33	19,79	20,58	21,00	82,70	1323,33
5.	Muara Badak	21,13	18,50	20,13	19,88	79,64	1274,00
6.	Marangkayu	20,73	18,64	20,64	19,23	79,24	1267,84
7.	Loa Janan	21,63	18,63	20,11	19,30	79,67	1274,72
8.	Loa Kulu	22,72	18,48	20,46	19,26	80,92	1294,72
9.	Tenggarong Seberang	21,91	18,75	20,91	20,25	81,82	1309,12
10.	Tenggarong	22,27	18,56	21,55	19,53	81,91	1310,56
11.	Sebulu	22,07	18,33	21,19	19,85	81,44	1303,04
12.	Muara Kaman	20,40	16,93	19,53	17,67	74,53	1193,53
13.	Kota Bangun	22,96	18,88	19,83	19,42	81,09	1297,44
14.	Muara Wis	22,38	21,95	21,52	22,10	87,95	1407,24
15.	Muara Muntai	22,69	20,63	21,69	20,69	85,79	1371,00
16.	Kenohan	20,33	17,94	19,33	19,94	76,54	1224,64
17.	Kembang Janggut	19,60	17,90	17,70	19,20	74,40	1190,40
18.	Tabang	21,33	18,60	19,27	18,53	77,73	1243,68

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Partisipasi masyarakat tahun 2019

Berdasarkan tampilan data diatas dapat diuraikan tentang tingkat partisipasi masyarakat di 18 (delapan belas) kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi adalah di Kecamatan Muara Wis yakni mencapai 87,95. Peringkat kedua ditempati Kecamatan Muara Muntai dengan nilai 85,79, sedangkan di peringkat ke-3 adalah Kecamatan samboja dengan nilai 85,00.

Sedangkan 3 (tiga) peringkat tingkat partisipasi terendah ada di Kecamatan Kembang Janggut dengan nilai 74,40, Kecamatan Muara Kaman dengan nilai 74,53 dan Kecamatan Kenohan dengan nilai 76,54..

Selanjutnya berdasarkan analisis yang dilakukan Analisis berdasarkan Typologi Participation dan Leader Participation uang dikemukakan Anstein, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7 Tingkat Partisipasi Masyarakat per Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan		Konversi Nilai IPM	Typologi Participation	Rata-rata Nilai	Leader Participation	Kualitas Partisipasi
1.	Samboja	1360,00	Tokenism	21,25	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
2.	Muara Jawa	1300,50	Tokenism	20,32	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
3.	Sanga-sanga	1328,64	Tokenism	20,76	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
4.	Anggana	1323,33	Tokenism	20,67	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
5.	Muara Badak	1274,00	Tokenism	19,91	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
6.	Marangkayu	1267,84	Tokenism	19,81	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
7.	Loa Janan	1274,72	Tokenism	19,91	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
8.	Loa Kulu	1294,72	Tokenism	20,23	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
9.	Tenggarong Seberang	1309,12	Tokenism	20,45	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
10.	Tenggarong	1310,56	Tokenism	20,48	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
11.	Sebulu	1303,04	Tokenism	20,36	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
12.	Muara Kaman	1193,53	Tokenism	18,63	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
13.	Kota Bangun	1297,44	Tokenism	20,27	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
14.	Muara Wis	1407,24	Tokenism	21,99	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
15.	Muara Muntai	1371,00	Tokenism	21,45	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
16.	Kenohan	1224,64	Tokenism	19,14	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
17.	Kembang Janggut	1190,40	Tokenism	18,60	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif
18.	Tabang	1243,68	Tokenism	19,43	Penentraman (Placation)	Cukup Aktif

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Partisipasi masyarakat tahun 2019

Tabel 3.8 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Komponen	Nilai Perkomponen	Nilai Penimbang	Konversi Nilai IPM
Akses	21,42	16	342,7
Kesadaran	19,91	16	318,6
Kontrol	21,8	16	337,3
Manfaat	20,65	16	330,4
Total	83,06	16	1329,0

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Partisipasi masyarakat tahun 2019

Hasil survey Indeks Partisipasi Masyarakat Tahun 2019 di kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 83,06, dari yang di targetkan sebesar 83, sehingga capaian kinerja IPM pada Tahun 2019 sebesar 100,07%.

Dari keseluruhan hasil survey Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 berada pada level menengah berarti derajat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan berada di posisi tangga ke-5 (lima) dari 8 (delapan) tangga yaitu pada tangga Penentraman *(Placation),* atau pada derajat partisipasi *(degree of tokenism)*. *Placation* merupakan level tertinggi dalam *tokenism,* maknanya masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk berpendapat dalam mengajukan usulan program, meskipun pada akhirnya yang mengambil keputusan utama tetap pihak pemerintah (termasuk anggota DPRD) tetapi aspirasi masyarakat tetap menjadi bahan pertimbangan.

Capaian IPM Tahun meningkat sebesar 6,45 point yaitu dari 76,64 di Tahun 2018 menadi 83,06 point di Tahun 2019.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Point	3,3001	3.3182	3.3198	3,2912 (Data Sementara)	3,48
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	86,62	84	86.61	88,075	87
3.	Indeks Partisipasi Masyarakat	Point	-	62,5	76,64	83,06	87

Sumber data: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD. A.M.Parikesit dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.10 Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	2.350.000.000,00	2.095.864.103,00	89,19
2.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	705.670.550,00	668.788.235,00	94,77
3.	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	1.249.000.000,00	934.740.880,00	74,84
4.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.000.000,00	180.665.739,00	90,33
5.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	746.957.450,00	503.624.260,00	67,42
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.230.000.000,00	1.680.691.575,00	75,37
7.	Program Keprotokolan Daerah	1.811.870.900,00	1.806.921.878,00	99,73
8.	Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	600.000.000,00	599.015.680,00	99,84
9.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	397.399.158,00	310.756.550,00	78,20
10.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	11.555.310.200,00	10.980.091.590,00	95,02
11.	Program Pembangunan Sisitem Pendaftaran Tanah	141.744.015,00	119.834.555,00	84,54
12.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10.839.718.042,00	7.371.323.773,00	68,00
13.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	100.000.000,00	56.540.100,00	56,54
14.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	41.201.843.847,00	37.092.882.451,00	90,03
15.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	1.956.807.800,00	1.334.231.563,00	68,18
16.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	346.977.800,00	340.447.800,00	98,12
17.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	4.921.563.120,00	4.371.486.926,00	88,82

18.	Program Layanan Administrasi Kepegawaian	885.000.000,00	631.570.800,00	71,36
19.	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1.043.377.700,00	619.394.549,00	59,36
20.	Program Pengembangan Sistem Evaluasi dan Advokasi Layanan	682.469.936,00	445.733.828,00	65,31
21.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.882.651.000,00	4.379.651.909,00	74,45
22.	Program Sistem Inovasi Daerah	297.340.000,00	277.108.176,00	93,20
23.	Program Penelitian Umum	2.773.820.400,00	2.365.961.598,00	85,30
24.	Program pengembangan data/informasi	600.000.000,00	229.543.090,00	38,26
25.	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	4.089.850.000,00	3.188.447.148,00	77,96
26.	Program Perancanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	2.300.000.000,00	1.715.742.236,00	74,60
27.	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	1.100.000.000,00	945.502.676,00	85,95
28.	Program Perancanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	1.325.000.000,00	1.193.646.470,00	90,09
29.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1.362.409.800,00	957.102.498,00	70,25
30.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	14.640.530.000,00	13.252.570.444,00	90,52
31.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	42.843.701.281,00	40.301.343.718,00	94,07
32.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.693.972.444,00	346.583.115.794,00	91,52
33.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.963.564.225,00	3.280.164.317,00	82,76
34.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.880.123.094,00	11.335.861.586,00	71,38
35.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77.516.229.288,00	64.579.427.977,00	83,31
TOTAL		**637.234.902.050,00**	**566.729.796.472,00**	**88,94**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 566.729.796.472,00 dari anggaran sebesar Rp. 637.234.902.050,00 atau 88,94%. Realisasi keuangan sebesar 88,94% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,18%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Faktor internal berupa perencanaan yang terarah dan terukur, dukungan SDM Aparatur yang profesional dan responsif, sarana dan prasarana yang memadai, dan efektifnya penerapan dan harmonisasi regulasi daerah.
2. Faktor eksternal tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, transparansi dan kepercayaan publik yang terus meningkat serta sinergitas dan kolaborasi antara pemangku kepentingan yang semakin harmonis dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Pengembangan inovasi terkait pelayanan yang semakin ditingkatkan, tersedianya standar pelayanan disetiap unit layanan, perbaikan fasilitas layanan, pengembangan kapasitas dan kemampuan aparatur yang memberi layanan,menjadi faktor - faktor pendorong meningkatnya kualitas pelayanan, sehingga semakin cepat, transparan, tanpa biaya, dan memberi layanan yang ramah sehingga kepuasan masyarakat semakin tinggi.
4. Telah dilakukannya perbaikan beberapa faktor penentu untuk peningkatan partisipasi masyarakat yaitu faktor mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang tetapi sampai pada proses implementasi, monitoring dan evaluasi.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya melalui metode yang lebih partisipatif agar masyarakat menyadari keberadaannya sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.
6. Faktor keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam pembangunan semakin ditingkatkan dengan keterbukaan informasi publik, sehingga keterlibatan masyarakat semakin besar dalam semua proses pembangunan.

2) Analisis Kinerja Sasaran 2: "Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah" dengan indikator Opini BPK, Indek Persepsi Korupsi, Predikat Akuntabilitas Kinerja mencapai **89,45%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	100%
2.	Indek Persepsi Korupsi	point	6,3	5,56	88,25%
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	predikat	A	B	80,10%
Rata – rata Capaian					89,45%

Sumber data: Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Opini BPK

Sekretaris Daerah mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan bidang pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur

IKU opini BPK merupakan indikator yang diukur berdasarkan hasil evaluasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana hasilnya pada tahun 2019 belum disampaikan karena masih dalam proses

evaluasi. Adapun Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 memperoleh predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", sesuai Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 22.b/LHP/XIX.SMD/V/2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal, dan Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 22.c/LHP/XIX.SMD/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Indek Persepsi Korupsi

Survei Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan antara Bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019, dilakukan di 18 kecamatan. Jenis Data penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dari sumber data (responden) dengan menggunakan kuisioner dengan metode wawancara langsung. Yang menjadi responden adalah pengusaha yang bergerak di 18 lapangan usaha, pengusaha yang memiliki pengalaman interaksi layanan, perusahaan kecil (53,14%), perusahaan menengah (23,43%), dan perusahaan besar (23,43%). Terhadap Layanan Pusat, Layanan Instansi Vertikal, Layanan Provinsi, Layanan Kabupaten, Layanan BUMN dan BUMD, serta Layanan Asosiasi Pengusaha. Dengan 7 (tujuh) indikator yaitu Daya Saing Lokal, Penghambat Kemudahan Usaha, Prevalensi Korupsi, Akuntabilitas Keuangan Publik, Motivasi Korupsi, Sektor Terdampak Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

Naiknya nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menandakan adanya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan, pelayanan dan lain sebgainya ke arah yang lebih baik, untuk terbebas dari yang namanya korupsi. Adapun hasil dari survey IPK adalah sebagai berikut :

Grafik 3.4 Indeks Persepsi Korupsi

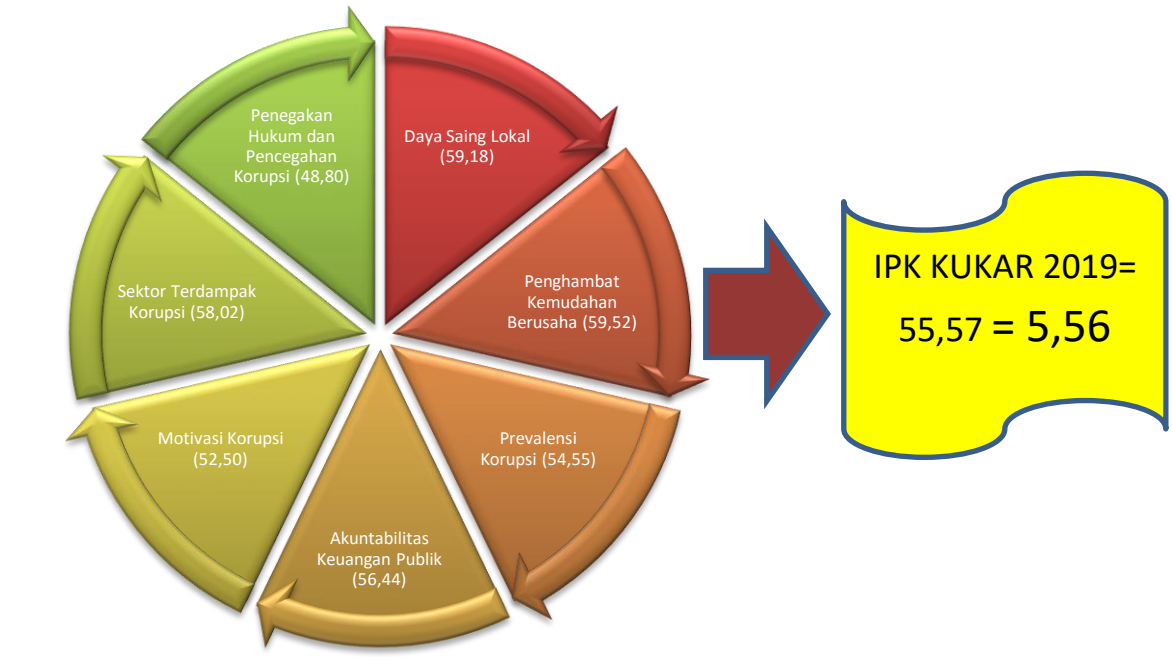

Paling Korup	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 - 100	Paling Bersih

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019

Dari perolehan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sebesar 5,56. Hasil IPK 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,62 dari IPK Tahun 2018 yaitu 4,94. Berikut perkembangan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun :

Grafik 3.5 Indeks Persepsi Korupsi

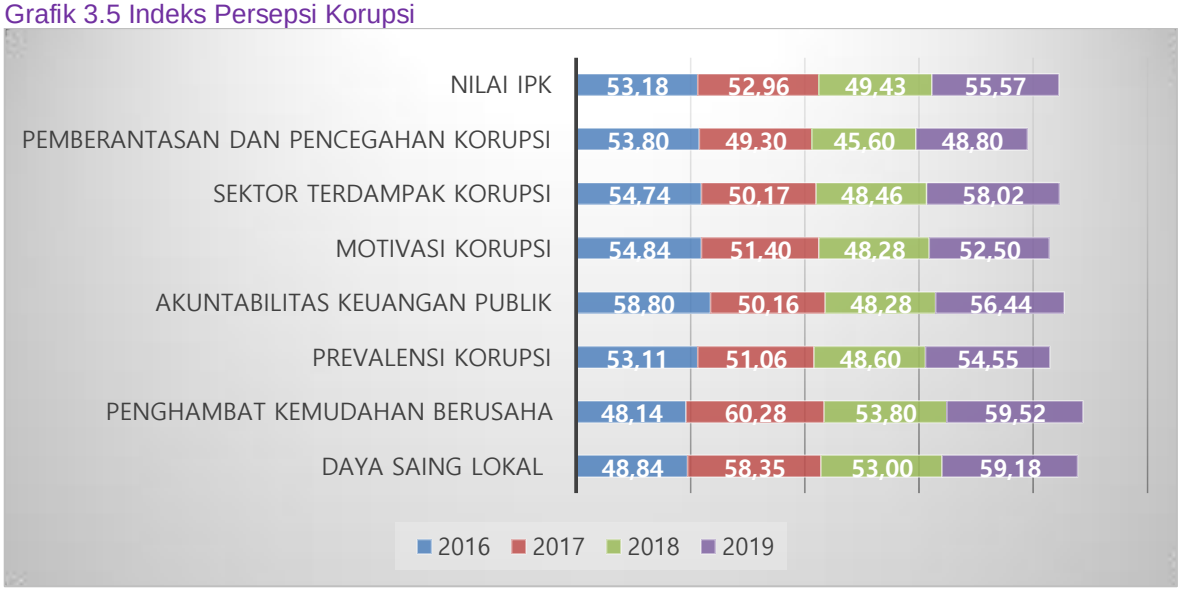

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019

Dari hasil survey terhadap Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, melahirkan beberapa rekomendasi antara lain:

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019

Dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 :

Sumber Data : Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2019

3. Predikat Akuntabilitas Kinerja

Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan pada tanggal 27 Januari 2020. Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 adalah 64,89, predikat “B”, dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Hal ini sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/377/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. Capaian kinerja Predikat LAKIP Kabupaten sebesar 80,10% dihitung dari perbandingan realisasi predikat LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (predikat B) dibagi target (predikat A) dikali seratus persen. Target kinerja Tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu dari Predikat BB menjadi Predikat A. Untuk Nilai SAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,34 point karena nilai Tahun 2018 sebesar 64,55 dengan capaian kinerja sebesar 92,21%. Capaian kinerja 2019 menurun, walaupun Nilai SAKIP meningkat, hal ini dikarenakan adanya peningkatan Target Kinerja yang pada Tahun 2018 adalah BB dan Target A di Tahun 2019.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
2.	Indek Persepsi Korupsi	point	5,75	5,31	4,94	5,56	6,9
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	predikat	B	B	B	B	A

Sumber data: Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.13 Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.784.887.800,00	10.171.129.200,00	73,78
2.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala Daerah	3.300.698.700,00	3.064.021.739,00	92,83
3.	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	6.849.500.000,00	4.547.891.512,00	66,40
4.	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	8.350.000.000,00	7.345.440.950,00	87,97
5.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	600.000.000,00	535.712.059,00	89,29
6.	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	925.000.000,00	582.900.950,00	63,02
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	76.922.027.345,21	46.696.772.894,00	60,71
TOTAL		**110.732.113.845,21**	**72.943.869.304,00**	**65,87**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 72.943.869.304,00 dari anggaran sebesar Rp. 110.732.113.845,21 atau 65,87%. Realisasi keuangan sebesar 65,87% dibandingkan dengan capaian kinerja

sasaran sebesar 89,45%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran antara lain:

1. Perencanaan kinerja dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat Daerah mulai dievaluasi dan diperbaharui sehingga sasaran strategis diupayakan secara optimal dapat berorientasi pada hasil. Antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis, target kinerja diupayakan selaras.
2. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMRAL yaitu Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.
3. Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan belum optimal, sehingga memberi dampak pada penilaian IPK, tapi upaya pemenahan sudah dilakukan dengan melakukan berbagai rekomendasi dari hasil survey persepsi korupsi yang telah dilaksanakan.
4. Pencapaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal, baik perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal maupun capaian kinerja. Tetapi upaya perbaikan dan pembenahan terus dilakukan.

3) Analisis Kinerja Sasaran 3: "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat" dengan 1 (satu) indikator Cakupan e-KTP mencapai **102,76%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"**. Capaian Sasaran sebagaimana "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat" disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan e-KTP	persen	96	98,65	102,76%

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan e-KTP

Cakupan e-KTP adalah cakupan KTP Elektronik persatuan penduduk, pada awal tahun Renstra telah mencapai mencapai 86,18%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 89,77% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 416.440 orang, sedangkan untuk realisasi tahun **2018** adalah sebesar **95,95%** dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 457.025 orang atau lebih 2,95% dari yang telah ditargetkan sebesar 93%, atau lebih 6,18% dari capaian tahun

sebelumnya, sedangkan untuk capaian tahun **2019** adalah sebesar **98,65%** dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 476.728 orang atau lebih 2,70% dibandingkan dengan tahun 2018, apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 sebesar **96%** maka capaiannya telah terlewati sebesar **2,65%**, dengan capaian kinerja sebesar **102,76%.**

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Cakupan e-KTP	persen	84,5	95,93	95,95	98,65	100

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.16 Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	10.548.219.325,00	10.264.838.504,00	97,31
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.548.195.000,00	3.440.121.904,00	96,95
TOTAL		**14.096.414.325,00**	**13.704.960.408,00**	**97,22**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 13.704.960.408,00 dari anggaran sebesar Rp. 14.096.414.325,00 atau 97,22%. Realisasi keuangan sebesar 97,22% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,76%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini dikarenakan :

1. Dukungan ketersediaan blanko KTP-el oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak pernah kosong.

Pelayanan Keliling di kecamatan oleh Disdukcapil Kab. Kukar

2. Adanya tambahan peralatan cetak KTP-el menjadi 11 unit dan tim perekaman keliling yang dilaksanakan oleh operator kecamatan bekerjasama dengan operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pemenuhan kebutuhan KTP-el dapat berjalan sesuai target, untuk diketahui Tahun 2017 ketersedian blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 33.419 keping KTP-el, untuk Tahun 2018 ketersedian blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 74.000 keping KTP-el, sedangkan untuk tahun 2019 dilakukan kerjasama pencetakan KTP-el dengan pihak ketiga lebih kurang sebanyak 40.000 keping KTP-el, sehingga mengalami peningkatan pencetakan dan distribusi blanko KTP-el dari tahun sebelumnya dengan persentase kenaikan sebesar 221,43 %, untuk jumlah wajib KTP tahun 2017 adalah sebanyak 463.909 wajib KTP, tahun 2018 jumlah wajib KTP meningkat menjadi 476.331, untuk tahun 2019 meningkat menjadi 483.268 wajib KTP-el, atau meningkat sebanyak 1,45%, hal ini dikarenakan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,80%.

3. Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya terus menerus dilakukan percepatan kepemilikan KTP-el dengan cara melihat data lokasi-lokasi di kecamatan mana saja yang capaiannya masih rendah untuk dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) perekaman dan memprioritaskan pencetakan KTP-el pada lokasi tersebut, untuk percepatan pencetakkan KTP-el sebaiknya menambah alat cetak/printer KTP-el baru agar dapat mempercepat proses pencetakan KTP-el.

Pelayanan Keliling Disdukcapil Kab. Kukar

4. Inovasi pelayanan publik juga terus dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satinya D'LACAK, dimana dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa memohon pencetakan KTP-el secara online dan memantau sampai dimana proses permohonannya tanpa perlu datang ke Kantor Capil, agar akses layanan semakin mudah terjangkau oleh masyarakat, walau berada jauh dari pusat kota kabupaten.

4) Analisis Kinerja Sasaran 4: "Optimalnya Pengendalian Penduduk Dan Pelayanan Keluarga Berencana"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran"Optimalnya Pengendalian Penduduk Dan Pelayanan Keluarga Berencana" dengan 1 (satu) indikator Peserta KB Aktif mencapai **103,36%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peserta KB Aktif	persen	73.91	76,40	103,36%

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Pencanangan Program Kampung KB oleh Bupati Kutai

1. Peserta KB Aktif

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama menunjukkan bahwa Peserta KB Aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2019 mengalami capaian yang signifikan, dimana dari target RPJMD Peserta KB Aktif pada tahun 2019 sebesar 73,91% terealisasi sebesar 76,40%, atau capaian target sebesar 103,36 % dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 113.082 akseptor dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 148.008. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,69 % dari capaian tahun 2017 sejak berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 73,29% maka pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 3.11% menjadi 76.40%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Peserta KB Aktif	persen	73,87	72,64	73,29	76,40	73,93

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.19 Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Keluarga Berencana	850.000.000,00	750.327.000,00	88,27
2.	Program pengendalian Penduduk	6.729.563.000,00	5.297.335.091,00	78,72
3.	Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	365.000.000,00	157.676.060,00	43,20
4.	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	696.510.000,00	456.505.455,00	65,54
TOTAL		8.641.073.000,00	6.661.843.606,00	77,10

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 6.661.843.606,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.641.073.000,00 atau 77,10%. Realisasi keuangan sebesar 77,10% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,36%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana dalam mengatur perencanaan keluarga dimasa yang akan datang.
2. Dukungan dari keadaan sosial ekonomi yang memberi dukungan terhadap kemampuan masyarakat untuk membeli/ memperoleh alat kontrasepsi.
3. Sosialisasi dan program yang dilakukan pemerintah juga sangan efektif, seperti pembentukan Kampung KB di semua desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5) Analisis Kinerja Sasaran 5: "Optimalnya Kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban, Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana" dengan indikator Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk, Indeks Risiko Bencana mencapai **146,97%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk	point	148	70,89	152,10%
2.	Indeks Resiko Bencana	point	130	75,6	141,84%
Rata – rata Capaian					**146,97%**

Sumber data: Polres Kukar dan Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000

Crime index merupakan salah satu indikator untuk mengukur kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Indeks kriminalitas merupakan perbandingan antara jumlah kejahatan saat ini dengan jumlah kejahatan tahun lalu dikalikan 100%. Metode pengukuran yang hampir senada adalah tingkat kriminalitas (crime rate), yaitu jumlah kejahatan dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100.000. Metode pengukuran lain yang juga sering dipakai adalah pengukuran waktu terjadinya kejahatan (crimeclock).

Metode pengukuran dengan indeks kriminalitas dan tingkat kriminalitas memiliki kesamaan kecenderungan, di mana semakin tinggi angkanya

berarti semakin rendah tingkat keamanan di masyarakat. Sementara untuk crime clock kebalikannya, di mana semakin tinggi nilainya berarti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin membaik. Hal ini berarti juga resiko penduduk terkena tindak pidana (crime risk) menurun karena selang waktu terjadinya kejahatan semakin lama.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kabupaten tentang "*Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk*" cara penghitungannya sebagai berikut :

$$\textit{Crime Rate} = \frac{Jumlah\ Peristiwa\ Kejahatan\ pada\ Tahun\ t}{Jumlah\ Penduduk}\ X\ 100$$

Sumber data :

- Banyaknya tindak kejahatan yang dilaporkan, tertunggak dan telah diselesaikan menurut Kabupaten/Kota dari Polda Kaltim dan BPS.
- Jumlah Penduduk dari OPD Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dan BPS.

Sehingga dapat dihitung Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate) 2019

$$\textit{Crime Rate} = \frac{494}{696.784}\ X\ 100.000 = = 70{,}89$$

Untuk tahun 2019, angka *Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 pendudukan adalah* = ***70,89***

Tugas Satpol PP dalam mencapai indikator kinerja kabupaten tersebut melalui :

1. Penegakan Produk Hukum Daerah:
   - Pengarahan
   - Pembinaan
   - Prefentif NonYustisial
   - PenindakanYustisial

2. Operasi Penertiban
3. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
4. Pengawalan Penjabat dan Orang-orang Penting
5. Pengamanan Tempat-tempat Penting
6. Patroli
7. Deteksi Dini
8. Termasuk pelaksanaan tugas kasi trantib di 18 kecamatan

Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 merupakan pengukuran kinerja realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka diperoleh realisasi capaian berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Sehingga diperoleh :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{148 - 70{,}89}{148} x\ 100\% = 152{,}10\%$$

2. Indeks Resiko Bencana

Bupati memantau kondisi banjir di Kecamatan Tenggarong

Ancaman Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 8 jenis antara lain Bencana Kebakaran Pemukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Tanah Longsor, Kecelakaan Transpormasi Air, Pohon Tumbang, Orang Hilang/ Tenggelam dan lain-lain. Selama Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi bencana sebanyak 189 Kejadian, dan dalam pencapaian indikator “Indeks Rasio Bencana”, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melaksanakan 6 (enam) Program dengan 20 (dua puluh) Kegiatan dalam Tahun 2019.

Bencana Longsor dipinggiran Sungai Mahakam

Dari penjelasan diatas maka Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan :

Formulasi perhitungan Indeks Resiko Bencana :

$$\text{Indeks Resiko Bencana} = \frac{(Ancaman\ Bencana\ X\ Jumlah\ Kejadian)}{Indeks\ Kapasitas\ (Kegiatan)}$$

$$\text{Indeks Resiko Bencana} = \frac{(8\ Ancaman\ Bencana\ X\ 189\ Kejadian)}{20\ Kegiatan}$$

$$\text{Indeks Resiko Bencana} = 75{,}6$$

Indeks Risiko Bencana merupakan pengukuran kinerja dengan realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka diperoleh realisasi capaian berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

Sehingga diperoleh :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{130 - 75{,}6}{130}\ x\ 100\% = 141{,}84\ \%$$

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 Penduduk	point	166,6	133,07	72	70,89	145
2.	Indeks Risiko Bencana	point	136	126	130	75,6	102

Peningkatan capaian sasaran ini dari tahun ketahun menandakan kondisi keamanan di Kabupaten Kutai kartanegara semakin baik, baik dari segi keamanan dan ketertiban, juga keamanan dari resiko bencana.

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.22 Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	975.000.000,00	924.692.598,00	94,84
2.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	139.155.000,00	139.155.000,00	100,00
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.840.337.800,00	1.768.820.825,00	96,11
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.068.061.800,00	1.003.206.000,00	93,93
5.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	4.757.760.000,00	4.730.800.050,00	99,43
6.	Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah	448.591.000,00	428.233.360,00	95,46
7.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Terealisasi	244.000.000	225.463.300	92,40
8.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	200.000.000	183.231.800	91,62
9.	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	179.000.000.00	171.637.600	95,89
10.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	2.947.495.500	2.752.551.550	93,39
11.	Program Pengembangan Sistim Pemulihan Bencana	479.787.800	460.725.600	96,03
12.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan	10.388.117.400	8.048.585.550	77,48
TOTAL		**23.667.306.300,00**	**20.837.102.233,00**	**88,04**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. Rp. 20.837.102.233,00 dari anggaran sebesar Rp. 23.667.306.300,00 atau . 88,04%. Realisasi keuangan sebesar 88,04% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar **146,97**%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Optimalnya seinergi yang terjalin dari pada stakeholder, terkait penanganan tindak pidana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum, sehingga menurunnya tindak kejahatan, dan menimbulakan rasa aman di masyarakat.

Bupati memeriksa dan turut membersihkan gorong-gorong setelah bencana banjir di Kecamatan Tenggarong

2. Fasilitasi kajian resiko bencana yang sudah dilaksanakan, memberi dampak berupa tindakan-tindakan pencegahan dini, baik berupa sosialisali kepada masyarakat, maupun mampu memetakan resiko bencana yang akan terjadi agar bisa diantisipasi.
3. Sarana dan prasarana terkait peralatan dan logistik tanggap bencana yang mendukung dan tercukupi.
4. Penyebaran informasi serta waktu tanggap bencana yang cepat, mampu meminimalisir dampak luas dari bencana, dengan peran serta aparat dan masyarakat.

Pemberian APD bagi Petugas Pemadam Kebakaran

Bupati menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran

5. Penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan dengan cepat, sehingga mampu melindungi masyarakat, serta meminimalisir bencana susulan/ terulang.

6) Analisis Kinerja Sasaran 6: "Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan" dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mencapai **93,245%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.23 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	point	14.89	13,57	91,13%
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	point	9.27	8,84	95,36%
Rata – rata Capaian					**93,245%**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) / Expected years of schooling (EYS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asusmsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Untuk Harapan Lama Sekolah di Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang cukup bagus. Penduduk usia 7 tahun ke atas di tahun 2019 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan sekolah hingga 13,57 tahun atau setara dengan jenjang diploma, namun capaian indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 lebih rendah 0,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

Target capaian kinerja RPJMD Harapan Lama Sekolah di Kutai Kartanegara yaitu 14,89, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 91,13%.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan level pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani oleh penduduknya. Lama sekolah dikonversi berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan, namun tidak termasuk tahun tidak naik kelas. Setiap level pendidikan yang ditamatkan dan yang telah dijalankan oleh seseorang akan dikonversi ke dalam satuan tahun lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 (dua belas) tahun. Begitu seterusnya hingga pendidikan tinggi. Perhitungan lama sekolah di sini, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Jadi meskipun seorang anak lulus SD namun pernah tidak naik kelas sebanyak 2 kali, akan tetap diperhitungkan lama sekolahnya selama 6 (enam) tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk Kutai Kartanegara pada tahun 2019 mencapai 8,84 tahun. Angka ini memberi arti bahwa secara rata-rata penduduk Kutai Kartanegara yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMP. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kutai Kartanegara 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 0,13 point, dimana pada Tahun 2018 yang mencapai 8,97 tahun.

Capaian rata – rata lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara memang belum memenuhi target RPJMD Tahun 2019 yaitu 9,27, sehingga capaian kinerja rata – rata lama sekolah sebesar 95,36%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Point	13,25	18,18	13,59	13,57	15,74
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Point	8,68	9,70	8,97	8,84	9,56

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.25 Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2019

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.657.100.000,00	3.477.167.218,00	61,47
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	217.420.288.481,00	190.201.268.279,00	87,48
3.	Program Pendidikan Non Formal	6.578.758.000,00	4.767.051.959,00	72,46
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.755.000.000,00	882.563.800,00	32,03
5.	Program Manajemen Layanan Pendidikan	4.425.000.000,00	3.296.374.600,00	74,49
TOTAL		**236.836.146.481,00**	**202.624.425.856,00**	**85,55**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 202.624.425.856,00 dari anggaran sebesar Rp. 236.836.146.481,00 atau 85,55%.

Realisasi keuangan sebesar 85,55% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 93,245%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Karena tidak mencapai 100% dalam capaian kinerja, walau penggunaan sumber daya masih dibawah capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di masa yang akan datang.
2. Faktor-faktor ekonomi juga mempengaruhi seperti tingkat kemiskinan, jumlah pendapatan.
3. Belum memadai dan meratanya sarana dan prasarana pendidikan, yang dibangun di seluruh wilayah, pembangunan masih terpusat di pusat-pusat kota, dan belum merata sampai ke pelosok sehingga keterbatasan akses pendidikan membuat kesulitan dalam mengenyam pendidikan bagi masyarakat.

SDN. 002 Tenggarong

4. Kurangnya anggaran, sehingga pembanguan fasilitas sekolah yang belum optimal, pemberian program-program beasiswa bagi masyarakat miskin dan yang berprestasi.

7) Analisis Kinerja Sasaran 7: "Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat" dengan indikator Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan mencapai **135,88%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan	persen	3,93%	5,34%	135,88%

Sumber data: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan

Untuk menghitung Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan menggunakan rumus perhitungan :

$$\textit{Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan} = \frac{\textit{Jumlah Kunjungan pada Tahun n} - \textit{Jumlah Kunjungan pada Tahun n-1}}{\textit{Jumlah Kunjungan pada Tahun n-1}} \times 100$$

Jumlah Kunjungan ke perpustakaan pada Tahun 2018 (thn. n-1) adalah sebanyak 227.070 pengunjung sedangkan pada tahun 2019 (thn. n) sebanyak 239.202 pengunjung, sehingga dengan menggunakan rumus perhitungan Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan pada Tahun 2019 adalah :

$$\textit{Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan} = \frac{239.202 - 227.070}{227.070} \times 100$$

$$= \mathbf{5,34\%}$$

Jadi Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan pada Tahun 2019 adalah 5,34%. Capaian kinerja tahun 2019 ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 3,93%, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 135,88%.

Capaian ini sangat tinggi dibandingkan keadaan di Tahun 2018, dimana capaian – 0,03 dari yang ditargetkan sebesar 3,89.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan	persen	17,53	42,31	-0.30	5,34	4,35

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.28 Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.655.000.000,00	1.367.706.880,00	82,64

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 1.367.706.880,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.655.000.000,00 atau 82,64%. Realisasi keuangan sebesar 82,64% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 135,88%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Suasana di dalam Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Telah dibangunnya Perpustakaan Daerah yang berdekatan dengan taman bermain yaitu Taman Pintar, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya pengunjung perpustakaan.
2. Sarana dan prasarana perpustakaan yang nyaman bagi pengunjung.
3. Penambahan koleksi bahan bacaan.
4. Pembinaan yang terus dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan.

8) Analisis Kinerja Sasaran 8: "Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan" dengan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi mencapai **101,76%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.29 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Harapan Hidup	point	71.72	72,21	100,68%
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	org	25	24	104%
3.	Angka Kematian Bayi	org	168	167	100,59%
Rata – Rata Capaian					**101,76%**

Sumber data: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Dalam hal ini berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh

karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya dinegara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Ada peningkatan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun. Capaian pada Tahun 2019 sebesar 72,21, angka ini meningkat dari capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 71,68, dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 0,53 dibandingkan dengan Tahun 2018.

Target di Tahun 2019 sebesar 71,72, sehingga capaian diTahun 2019 sebesar 100,68%.

2. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Pengertian Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.

Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Jumlah Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019 sebesar 24 Orang, walaupun angka ini lebih rendah dari yang perkiraan / target RPJMD tahun 2019, namun Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yaitu sebanyak 22 kematian ibu melahirkan.

Angka Kematian Ibu Melahirkan merupakan pengukuran kinerja realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka diperoleh realisasi capaian berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Sehingga diperoleh :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{25 - 24}{25} x\ 100\% = 104\%$$

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan, masih belum sesuai harapan, meskipun jumlahnya lebih rendah dari perkiraan/ target RPJMD. Hal ini disebabkan persalinan masih ada ditolong oleh bidan, serta Program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) masih belum berjalan dengan baik.

3. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara/ daerah.

Lebih spesifik, angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan di negara/ daerah tersebut. Tak pelak, angka ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa mendatang.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Jumlah Angka Kematian Bayi Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019 sebanyak 167 orang. Angka ini lebih rendah 11 orang jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebanyak 178 orang bayi meninggal dunia. Angka ini lebih rendah dari perkiraan/ target RPJMD yaitu sebesar 168 orang

kematian bayi. Tetapi angka ini masing sangat tinggi, untuk mengatasinya sangat diperlukan dukungan lintas sektor, bahwa tanggung jawab terhadap penurunan Angka Kematian Bayi (AKI) juga memerlukan keterlibatan lintas sektor.

Angka Kematian Bayi merupakan pengukuran kinerja realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka diperoleh realisasi capaian berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Sehingga diperoleh :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{168 - 167}{168} x\ 100\% = 100{,}59\%$$

Realisasi Sasaran RPJMD “Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan” dengan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, dapat dilihat dalam grafik :

Grafik 3.6 AHH, AKI, AKB

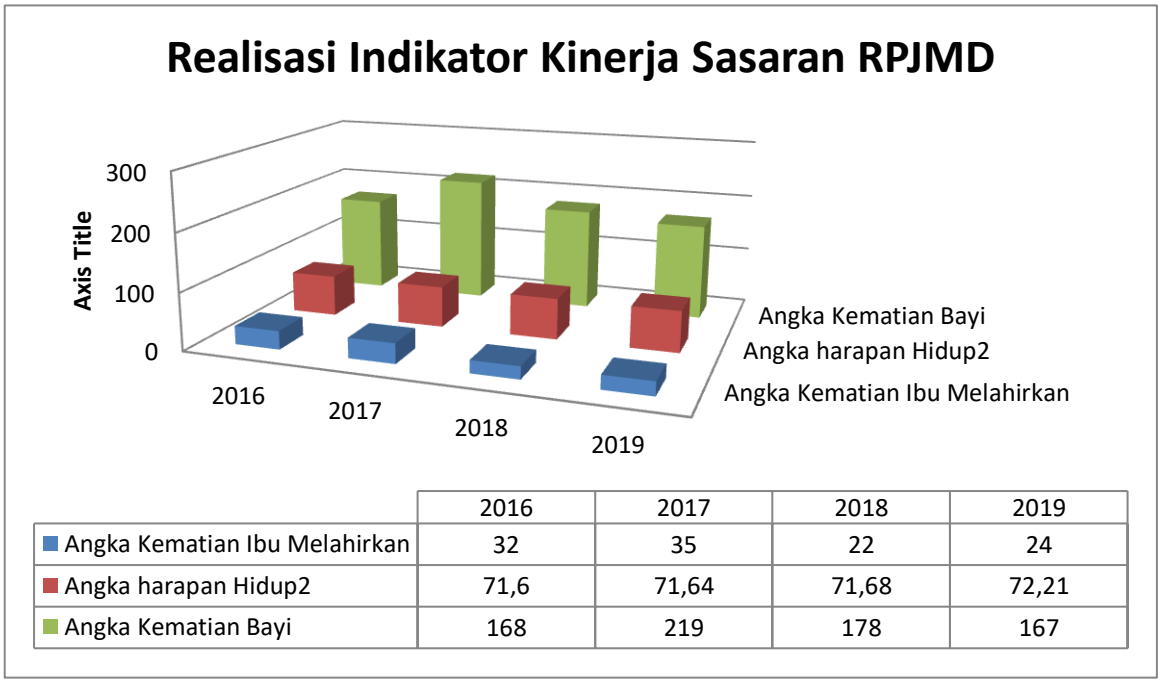

	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Ibu Melahirkan	32	35	22	24
Angka harapan Hidup2	71,6	71,64	71,68	72,21
Angka Kematian Bayi	168	219	178	167

Sumber data: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.30 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Angka Harapan Hidup	point	71,60	71,64	71,68	72,21	71,79
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang	32	35	22	24	23
3.	Angka Kematian Bayi	Orang	168	219	178	167	146

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.31 Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	43.431.711.459,00	33.758.397.511,00	72,85
2.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.559.856.225,00	2.561.507.784,00	71,96
3.	Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	2.474.688.000,00	1.114.269.028,00	45,03
4.	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	50.445.725.409,00	42.037.027.172,00	83,33
5.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	47.322.116.682,00	41.421.449.132,00	84,48
6.	Program obat dan perbekalan Kesehatan	15.933.205.000,00	10.524.844.877,00	74,94

7.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	33.054.628.000,00	30.203.722.813,00	88,89
8.	Program Pengawasan Obat dan makanan	550.000.000,00	387.633.300,00	70,48
9.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.524.190.000,00	1.147.668.811,00	75,30
10.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	600.000.000,00	450.400.800,00	75,07
11.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.361.085.000,00	828.470.863,00	73,29
12.	Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	4.918.380.000,00	4.341.081.730,00	88,26
13.	Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	1.092.630.866,00	698.132.506,00	63,89
14.	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	7.997.000.000,00	3.187.663.933,00	39,86
15.	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	150.000.000,00	57.474.000,00	38,32
16.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	150.000.000,00	78.568.150,00	52,38
17.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	6.834.098.800	4.352.212.695	77,14
18.	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	962.760.000,00	658.902.951,00	68,44
19.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	5.572.631.853,00	4.997.875.284,00	90,92
TOTAL		**227.934.707.294,00**	**182.807.303.340,00**	**80,20**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 182.807.303.340,00 dari anggaran sebesar Rp. 227.934.707.294,00 atau 80,20%. Realisasi keuangan sebesar 80,20% dibandingkan dengan capaian kinerja

sasaran sebesar 101,76%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Semakin baiknya tingkat gizi masyarakat, serta penerapan pola hidup sehat membuat peningkatan status kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, berupa sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah sakit sampai dengan puskesmas yang tersebar di kecamatan, kelurahan dan desa.

3. Program dan inovasi yang dikembangkan terkait deteksi dini kehamilan yang beresiko, mampu menurunkan angka kematian bayi dan akngka kematian ibu melahirkan dan inovasi layanan kesehatan lainnya.

9) Analisis Kinerja Sasaran 9: "Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja" dengan indikator Rasio Kesempatan Kerja mencapai **95,91%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.32 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Rasio Kesempatan Kerja	persen	0,98	0,94	95,91%

Sumber data: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Kesempatan Kerja

Untuk menghitung capaian kinerja rasio kesempatan kerja menggunakan rumus perhitungan :

$$\text{Rasio Kesempatan Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yg Ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar}}$$

Pada Tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 337.050 orang, sedangkan Jumlah tenaga kerja terdaftar sebanyak 358.411 orang, sehingga :

$$\text{Rasio Kesempatan Kerja} = \frac{337.050}{358.411} = 0{,}94$$

Rasio Kesempatan Kerja Tahun 2019 sebesar 0,94, hal ini sama dengan capaian kinerja Tahun 2018. Target terhadap sasaran ini ditahun 2019 sebesar 0,98, sehingga capaian kinerja Rasio Kesempatan Kerja Tahun 2019 adalah 95,91%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.33 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Rasio Kesempatan Kerja	Persen	0,95	0,94	0,94	0,94	0,99

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.34 Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	1.242.290.000,00	954.298.835,00	76,82
2.	Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1.020.899.200,00	908.400.250,00	88,98
3.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	150.000.000,00	140.417.700,00	93,61
TOTAL		**2.413.189.200,00**	**2.003.116.785,00**	**83,01**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 2.003.116.785,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.413.189.200,00 atau 83,01%. Realisasi keuangan sebesar 83,01% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,91%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Karena tidak mencapai 100% dalam capaian kinerja, walau penggunaan sumber daya masih dibawah capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan pencapaian sasaran antara lain karena masih adanya gejolak ekonomi dimana harga jual batubara yang turun sehingga banyak perusahaan sektor pertambangan yang melakukan pengurangan jumlah karyawannya begitu pula perusahaan sektor perkebunan di Tahun 2019.

10) Analisis Kinerja Sasaran 10: "Meningkatnya Prestasi Dan Kreativitas Pemuda Dan Olahraga"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga" dengan indikator Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri dan Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index) mencapai **166,42%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.35 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri	persen	4	10,54	263,50%
2.	Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index)	persen	60	41,60	69,33%
Rata – rata Capaian					166,42%

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri**

   Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara mendirikan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri yang dimana berdirinya "WPM" yang diharapkan menjadi mediator pengembangan kemampuan dan mengasah kreativitas pemuda untuk bergerak di dunia wirausaha, atau diharapkan sebagai penyelesaian masalah ketenagakerjaan pemuda yang ada di Kutai Kartanegara yang dimana program ini lebih ke upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan pemuda agar bisa mandiri dan berwirausaha dan menurut data Badan Pusat Statistik Kukar 2018, ada 43 % penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara

memilih menjadi karyawan, guru dan PNS, sementara yang berwirausaha masih sekitar 23,7 %.

Untuk mencapai target 5000 wirausaha muda yang dilatih dari Tahun 2016-2021, maka pada Tahun 2019 dilakukan pelatihan terhadap 527 orang wirausaha muda. Jadi Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri pada Tahun 2019 adalah :

$$\textit{Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri} = \frac{\textit{Jumlah Wirausaha dilatih Tahun n}}{\textit{Target Wirausaha dilatih}} \times 100$$

$$= \frac{537}{5000} \times 100 = \mathbf{10,54\%}$$

Target RPJMD Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri sebesar 4%, sehingga bila dikaitkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 10,54%, maka capaian kinerja Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri Tahun 2019 sebesar 263,50%.

2. Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index)

Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Indeks Pembangunan Olahraga (SDI) dari 39,1% pada tahun 2018 menjadi 41,6% pada tahun 2019, dimana pengukuran SDI sebagai berikut :

1. Dimensi SDM Olahraga
   - SDM yang dibina pada tahun 2019 : 30 orang
   - JumlahTarget pada tahun 2019 : 90 orang
   - Maka Indeks dimensi SDM yang sudah dibina : 0,333
2. Dimensi Infrastruktur/Ruang terbuka
   - Pada tahun 2019 fasilitasi Ruang Terbuka olahraga terdapat di 3 kecamatan
   - JumlahTarget pada tahun 2019 : 18 Kecamatan
   - Maka Indeks dimensi SDM yang sudah dibina : 0,176

3. Dimensi Partisipasi Olahraga
   - Pada tahun 2019 terdapat banyak fasilitasi –fasilitasi kegiatan olahraga, adapun total peserta aktif olahraga sejumlah 2.120 orang
   - Jumlah target pada tahun 2019 sebanyak 3500 orang
   - Maka Indeks dimensi SDM yang sudah dibina : 0,606
4. Dimensi Kebugaran :
   - Pada tahun 2019 telah dilakukan pengukuran tingkat kebugaran dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dengan 55 orang memiliki tingkat kebugaran yang cukup
   - Maka Indeks dimensi SDM yang sudah dibina : 0,55

Jadi untuk tahun 2019 Indeks Pembangunan Olahraga yang telah dilaksanakan adalah sebesar 41,6 dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

SDI / IPO = $\frac{0,333+0,176+0,606+0,55}{4}$ = 0,416 atau sama dengan **41,6%**

Target Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index) tahun 2019 sebesar 60%, namun capaian kinerja sebesar 41,6%, sehingga persentase capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 69,33%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.36 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri	persen	20	30	4	10,54	5,5
2.	Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index)	persen	35,3	82,38	39	41,6	75

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.37 Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4.548.829.000,00	3.721.515.600,00	81,81
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.750.000.000,00	1.457.369.930,00	83,28
3.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.100.000.000,00	917.619.516,00	83,42
4.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	26.984.815.000,00	26.400.353.325,00	97,83
5.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	500.000.000,00	488.814.059,00	97,76
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	4.885.235.760,00	4.393.329.578,00	89,93
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100.000.000,00	0,00	0,00
8.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.371.000.000,00	1.166.021.044,00	85,05
TOTAL		**41.239.879.760,00**	**38.545.023.052,00**	**93,47**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 38.545.023.052,00 dari anggaran sebesar Rp. 41.239.879.760,00 atau 93,47%. Realisasi keuangan sebesar 93,47% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 166,42%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah, balai-balai latihan kerja maupun sektor swasta, sehingga mampu meningkatkan jumlah pelatihan untuk mewujudkan pemuda wirausaha mandiri.
2. Adanya inovasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu Klinik Wirausaha Mandiri, yang memberikan pendampingan, konseling dan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kewirausahaan pemuda.
3. Pemdinaan yang dilakukan pemerintah terhadap olahraga juga cukup baik, salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.

11) Analisis Kinerja Sasaran 11: "Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial" dengan indikator Jumlah Desa Berketahanan Sosial, Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal, dan Indeks Kemandirian Desa mencapai **104,96%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.38 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Desa Berketahanan Sosial	jumlah Desa/Kel	150	228	152%
2.	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal	persen	60	44,40	74%
3.	Indeks Kemandirian Desa	persen	0.72	0,64	88,89%
Rata – rata Capaian					104,96%

Sumber data: Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Desa Berketahanan Sosial

Pemerintah telah berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dari 10,96 persen tahun 2014 menjadi 7-9 persen pada tahun 2019. Salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut adalah meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin untuk mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan. Kementerian Sosial mewujudkan komitmen ini dengan cara membangun lembaga pelayanan dan perlindungan sosial terpadu di daerah atau yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu satu

Pintu (PTSP) untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. PTSP yang diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi masyarakat miskin ini disebut Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di level kabupaten/kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di level desa/kelurahan.

Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta. Puskesos adalah miniatur dan perpanjangan tangan SLRT di level desa/kelurahan. Pemerintah desa/kelurahan diharapkan menyediakan kontribusi natura dan anggaran Puskesos untuk mendukung pelaksanaan Puskesos.

Hingga tahun 2019 telah terdapat 228 Desa/ Kelurahan yang memiliki Puskesos, dimana keberadaan puskesos desa/ kelurahan merupakan indikator Desa Berketahanan Sosial, kondisi ini melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD dimana target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 150 Desa Berketahanan Sosial. Sehingga diperoleh capaian kinerja indikator Jumlah Desa Berketahanan Sosial 2019 sebesar 152%. Jumlah Puskesos yang yang dibentuk di desa/ kelurahan Tahun 2019 lebih rendah dari capaian Tahun 2018 yaitu sebanyak 291 desa/ kelurahan yang memiliki Puskesoso.

2. Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal

Capaian kinerja untuk indikator ini diperoleh dari Jumlah Puskesos yang berfungsi optimal dibagi jumlah puskesos dikali seratus. Dari data yang terkumpul di akhir tahun 2019 terdapat 101 Puskesos yang berfungsi optimal, hal ini dibuktikan dengan Laporan Kegiatan yang dikirim kan ke Dinas Sosial, sehingga diperoleh angka 44.3% Puskesos yang berfungsi Optimal di tingkat Desa maupun Kelurahan pada Tahun 2019. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2018, dimana pada Tahun 2018 hanya diperoleh capaian sebesar 18%, dengan kata lain capaian kinerja Tahun 2019 meningkat 26,4% dari Tahun 2018.

Namun capaian kinerja ini masih belum memenuhi target RPJMD pada Tahun 2019, yaitu sebesar 60%, dan jika dibandingkan dengan target maka presentase capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 74%.

3. Indeks Kemandirian Desa

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tidak lagi menggunakan Indeks Kemandirian Desa, yang digunakan saat ini adalah Indeks Desa Membangun. Sehingga yang digunakan dalam laporan capaian kinerja ini adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Adapun capaian IDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah 0,64 dari yang di targetkan sebesar 0,72, dengan persentase capaian sebesar 88,89%. capaian di Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar 0,59 atau meningkat sebesar 0,05. Dengan hasil capaian 0,64 menempatkan Kabupaten Kuti kartanegara di Status IDM sebagai "Desa Berkembang"dengan ambang batas penilaian $0{,}5989 < IDM \leq 0{,}7072$.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.39 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Jumlah Desa Berketahanan Sosial	jumlah Desa/ Kel	-	10	291	228	237
2.	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal	persen	-	4,2	18	44,4	100
3.	Indeks Kemandirian Desa	persen	-	-	0,59	0,64	0,87

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.40 Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.904.818.752,00	1.556.055.099,00	81,69
2.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	359.070.000,00	299.127.708,00	83,31
3.	Program Pengembagan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.185.000.000,00	1.050.616.000,00	88,66
4.	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	470.000.000,00	367.710.970,00	78,24

5.	Program Desa Pemberdayaan Masyarakat	400.000.000,00	367.437.000,00	91,86
TOTAL		**4.318.888.752,00**	**3.640.946.777,00**	**84,30**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 3.640.946.777,00 dari anggaran sebesar Rp. 4.318.888.752,00 atau 84,30%. Realisasi keuangan sebesar 84,30% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,96%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yaitu terjalinnya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan aturan terkait pengentasan kemiskinan, sampai dengan pemberian dana desa dan kelurahan, sebagai upaya mempercepat pembangunan desa, komitmen dari pemerintah daerah sampai pihak desa/ kelurahan dalam melaksanakan program pemerintah pusat, serta dukungan dari masyarakat yang turut membantu pencapaian hasil ini.

12) Analisis Kinerja Sasaran 12: "Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial" dengan indikator Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial **129,09%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.41 Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	55	71	129,09%

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

   Capaian ini diukur melalui jumlah PMKS yang tertangani melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama Kurun waktu tahun 2019. Sumber pembiayaan penanaganan PMKS ini berasal dari APBN dan APBD. Dalam penananganan PMKS Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat tergantung dari Program - program Kementrian Sosial RI diantaranya yang paling berpengaruh besar adalah Program Keluarga Harapan dan program Bantuan Pangan Non Tunai yang mafaatnya sangat dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat diwilayah kabupaten Kutai Kartanegara. Angka relasiasi tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah Penduduk Miskin yang menerima bantuan PKH, BPNT dan Penanganan Sosial lainya di bagi dengan populasi penduduk miskin yang terdata dalam BDT.

Menurut Laporan Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab.Kutai Kartanegara jumlah Fakir Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 35.918 KK dan 125.926 Jiwa, dan yang merupakan Kuota penerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahun 2019 adalah 23.746 Jiwa dan penerima Program PKH dan penanganan sosial lainnya sebanyak 65.662 jiwa.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.42 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	93,86	96,60	97	71	85

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.43 Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1.015.000.000,00	698.874.067,00	68,85
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.524.000.000,00	4.049.766.885,00	89,52
3.	Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1.880.000.000,00	1.080.530.904,00	57,48
4.	Program Pemberdayaan Sosial	867.846.000,00	846.156.242,00	97,50
5.	Program Penanganan Fakir Miskin	1.294.861.725,00	1.009.846.735,00	77,99
TOTAL		**9.581.707.725,00**	**7.685.174.833,00**	**80,21**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 7.685.174.833,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.581.707.725,00 atau 80,21%. Realisasi keuangan sebesar 80,21% dibandingkan dengan capaian kinerja

sasaran sebesar 129,09%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Adanya dukungan program dari Kementrian Sosial (BPNT dan PKH).
2. Adanya penambah Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial
3. Data Calon Penerima Asistensi Sosial sudah tersedia.
4. Tersedia Aplikasi pengelola Data PMKS.
5. Dukungan Program penanganan Prostitusi dari Kementrian Sosial.
6. SDM yang melaksanakan program/kegiatan
7. Proses Penyusunan data Base PMKS dan PSKS masih berlanjut.

13) Analisis Kinerja Sasaran 13: "Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan Antar Sektor Antar Wilayah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah" dengan indikator Tingkat Keparahan Kemiskinan (P1), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P2) dan Cakupan Rumah Layak Huni mencapai **-122,62%** dan termasuk predikat **"kurang berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.44 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	persen	0,41	0,95	-31,71%
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	persen	0,03	0,19	-433,33%
3.	Cakupan Rumah Layak Huni	persen	92.12	89,53	97,18%
Rata – rata Capaian					-122,62%

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal itu pula mengindikasikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 tidak ada perubahan dari Tahun 2018 yaitu 0,95%. Hal ini sangat jauh dari yang di targetkan yaitu sebesar 0,41%. Jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan relatif tidak berubah yaitu 0,95 hal ini karena tidak terjadi peningkatan rata-rata daya beli penduduk

miskin sehingga tidak terjadi pergeseran konsumsi mendekati garis kemiskinan.

2. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,01% dari Tahun 2018 sebesar 0,2% menjadi 0,19 di Tahun 2019. Hal ini membuat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin menurun sebesar 0,01 artinya selama tahun terakhir jarak rata-rata konsumsi antar penduduk miskin semakin mendekat walaupun tidak signifikan. Walaupun Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan, namun capaian kinerja untuk menurunkan Tingkat Keparahan Kemiskinan, masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 0,03%.

Grafik 3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

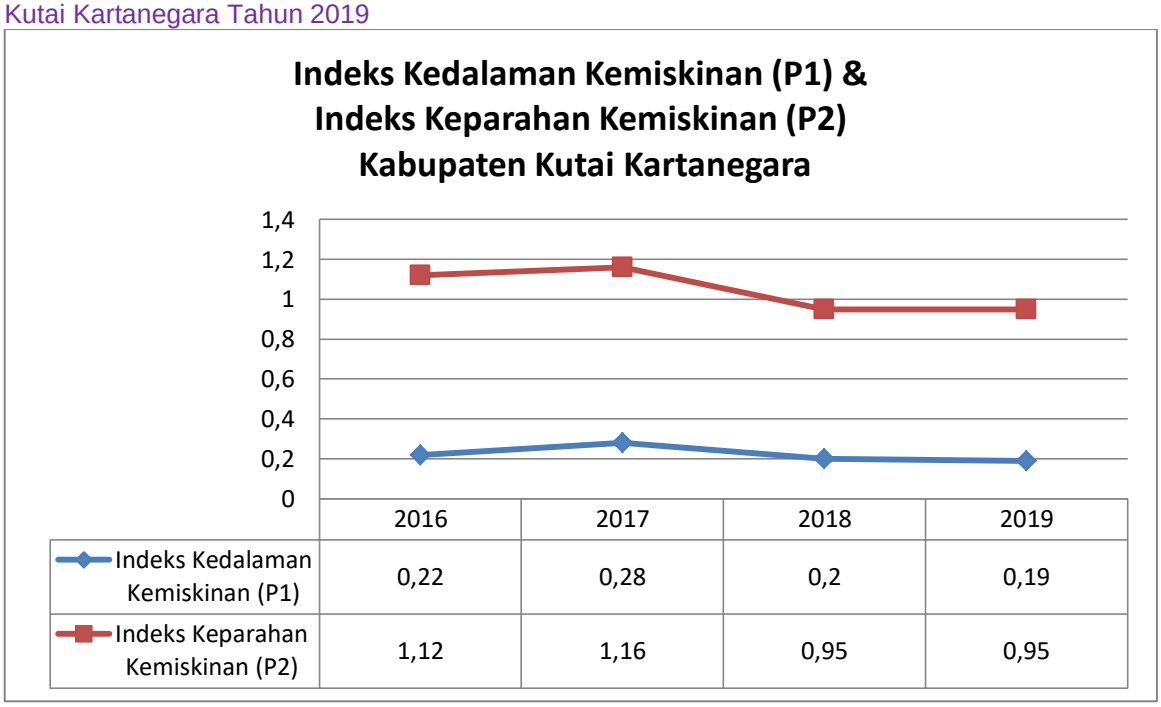

	2016	2017	2018	2019
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,22	0,28	0,2	0,19
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,12	1,16	0,95	0,95

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

3. Cakupan Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama Cakupan Rumah Layak Huni adalah Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Seluruh Rumah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara x 100%.

Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layah huni. Untuk data RTLH berdasarkan data BDT. Jadi untuk nilai capaian tahun 2019 sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di Kukar}} \; x \; 100$$

$$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{163.975}{183.156} \; x \; 100 = 89{,}53\%$$

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat dilihat bahwa untuk cakupan rumah layak huni mengalami penurunan sebesar 1,38% dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 90,91%. Target pada Tahun 2019 sebesar 92,12 %, sehingga persentase capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 97,19%.

Pelasanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Senoni

Hal ini dipengaruhi jumlah data rumah tidak layak huni yang ada di kementerian tidak dapat diperbaharui karena tidak tersedianya data rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh CSR maupun swadaya masyarakat, baik itu berupa dokumentasi maupun surat keterangan/ pernyataan. Namun disisi lain dengan ada pula peningkatan data jumlah rumah tidak layak huni melalui aplikasi E-RTLH yang dilakukan oleh masing-masing pokja kecamatan. Di tahun 2019 ini pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai

Kartanegara telah menetapkan Kecamatan Sebulu untuk memperoleh bantuan rehabilitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dana APBD. Adapun jumlah bantuannya sebanyak 64 Unit yang terdiri 3 Desa yaitu Desa Sanggulan, Desa Senoni dan Desa Selerong. Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan kegiatan pendampingan dan fasilitasi kegiatan APBN seperti PISEW, BSPS dan KOTAKU (Loa Janan Ulu).

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.45 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	persen	1,12	1,16	0,95	0,95	0,35
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	persen	0,22	0,28	0,2	0,19	0,01
3.	Cakupan Rumah Layak Huni	persen	89,78	90,18	90,91	89,53	93,53

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.46 Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	250.000.000,00	97.420.000,00	38,97
2.	Program Bedah Rumah	1.250.000.000,00	1.226.706.400,00	98,14
TOTAL		**1.500.000.000,00**	**1.324.126.400,00**	**88,28**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 1.324.126.400,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 atau 88,28%. Realisasi keuangan sebesar 88,28% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar -122,62%, maka terjadi ketidak efisienan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, karena target sasaran tersebut tidak tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain:

1. Luasnya wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau juga menjadi salah satu penyebab tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, ditambah fluktuatifnya pengeluaran pemerintah terhadap penanganan kemiskinan, lemahnya pendampingan dan kurangnya kemauan masyarakat yang telah dibantu untuk mengubah nasibnya sendiri juga menyebabkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
2. Fakta bahwa tingkat pendidikan sangat dibutuhkan dalam mencari pekerjaan yang layak tidak bisa dipungkiri, rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama didaerah daerah pedalaman yang masih terasing menyebabkan masyarakatnya masih sulit untuk lepas dari kemsikinan. Sedangkan masalah kalah bersaingnya tenaga kerja lokal dengan para pendatang dalam memperoleh pekerjaan di posisi strategis pada sebuah perusahaan menyebabkan penggguran banyak berasal dari warga atau penduduk lokal. Dan pada akhirnya hal tersebut menjadi penyumbang meningkatnya angka Kemiskinan.

14) Analisis Kinerja Sasaran 14: "Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah" dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi mencapai **1.224,82%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.47 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	persen	5,60	68,59	1.224,82%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi

   Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada Tahun 2019, dari yang ditargetkan sebesar 5,60 % Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 68,59%.

Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi adalah :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\text{Nilai Investasi Tahun n}}{Nilai\ Investasi\ Tahun\ n-1}\ x\ 100\%$$

Dimana Nilai Investasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 6.607.110.400.000,- dan Nilai Investasi pada Tahun 2018 sebesar Rp. 3.918.961.657.024,- sehingga :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\text{Rp. 6.607.110.400.000}}{\text{Rp. 3.918.961.657.024}}\ x\ 100\%$$

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.48 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	persen	-57,48	-34,81	9,4	68,59	11,29

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.49 Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	698.003.188,00	600.194.234,00	85,99
2.	Program Pengendalian Penanaman Modal	200.000.000,00	163.631.400,00	81,82
3.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	250.000.000,00	242.165.350,00	96,87
TOTAL		**1.148.003.188,00**	**1.005.990.984,00**	**87,63**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 1.005.990.984,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.148.003.188,00 atau 87,63%. Realisasi keuangan sebesar 87,63% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 1.224,82%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong meningkatnya pertumbuhan investasi, baik dari sektor pertambangan dan perkebunan.
2. Ketersediaan sarana prasarana, dalam menjalankan usaha turut meningkatkan pertumbuhan investasi.

3. Regulasi dibidang investasi, stabilitas politik, dan kondisi sosial budaya merupakan faktor pendorong iklim investasi.
4. Dikembangkannya inovasi pelayanan, DPMPTSP menerapkan pelayanan terintegrasi melalui satu pintu. Selain itu, akan mengacu pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam menerbitkan izin usaha oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Bupati/Walikota dalam bentuk dokumen elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Inovasi tersebut dilakukan dalam mendukung kemudahan berinvestasi di Kab. Kutai Kartanegara.

15) Analisis Kinerja Sasaran 15: "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah" dengan indikator Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015) mencapai **743,70%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.50 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)	persen	8,97	66,71%	743,70%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Adapun rincian realisasi komponen pembentuk PAD tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 3.51. Rincian Realisasi Komponen Pembentuk PAD Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian	Kontribusi terhadap Total PAD
1.	Pajak Daerah	60.252.455.223,50	75.132.818.869,33	124,70%	15%
2.	Retribusi Daerah	6.421.158.562,00	6.409.603.433,41	99,82%	1%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	34.120.806.627,81	32.120.806.627,81	94,14%	6%
4.	Lain-lain PAD yg Sah	290.850.688.907,12	400.115.104.993,05	137,57%	78%
TOTAL PAD		391.645.109.320,43	513.778.333.923,60	131,18%	100%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 sebesar Rp. 513.778.333.923,60,-. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 308.178.967.905,- pada Tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 205.599.366.018,- . Sehingga untuk menghitung Pertumbuhan PAD (Tahun Dasar 2015) pada Tahun 2019 adalah:

$$\text{Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)} = \frac{\text{PAD 2019} - \text{PAD 2018}}{PAD\ 2018} x\ 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)} = \frac{513.778.333.923{,}60 - 308.178.967.905}{308.178.967.905} x\ 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)} = 66{,}71\%$$

Sumbangan terbesar penerimaan PAD di Tahun 2019 berasal dari pendapatan lain-lain yang sah dikarenakan adanya pendapatan dari Participating Interest (PI) Perusahaan Daerah MGRM pada Pertamina Ulu Mahakam sebesar Rp. 119.000.000.000,00.

Grafik 3.8 PAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019

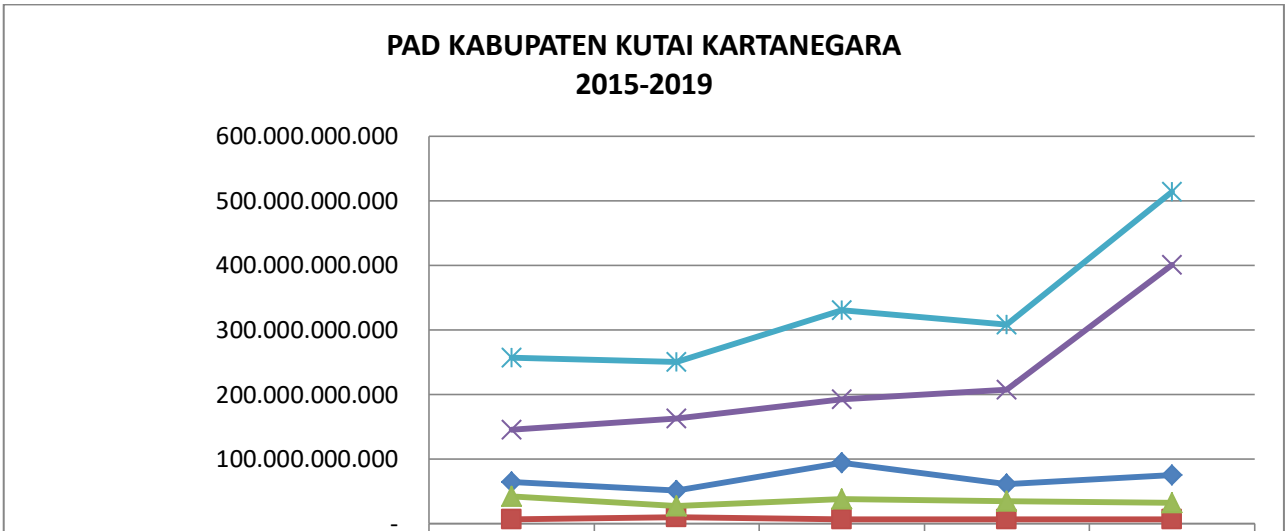

	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	63.999.809.497	50.525.825.232	93.648.552.076	60.991.506.675	75.132.818.869
Retribusi	6.048.180.562	9.928.995.410	6.165.948.667	6.219.679.404	6.409.603.433
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	41.892.654.522	27.003.667.114	37.858.506.867	34.063.589.823	32.120.806.628
Lain-lain PAD yg Sah	144.932.940.984	162.431.589.042	192.320.499.782	206.904.192.003	400.115.104.993
Total PAD	256.873.585.565	249.890.076.798	329.993.507.393	308.178.967.905	513.778.333.924

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.52 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)	persen	-11,95	19,58	7,77	66,71	11,29

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.53 Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	701.315.200,00	314.330.875,00	44,82
2.	Program Peningkatan PAD	6.141.307.300,00	5.022.372.452,00	81,78
TOTAL		**6.842.622.500,00**	**5.336.703.327,00**	**77,99**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 5.336.703.327,00 dari anggaran sebesar Rp. 6.842.622.500,00 atau 77,99%. Realisasi keuangan sebesar 77,99% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 743,70%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pajak.
2. Perbaikan tata kelola pajak, sehingga memperbaiki proses pendataan dan pemutahiran data pajak sehingga berdampak pada penambahan jumlah Wajib Pajak
3. Adanya verifikasi penilaian individu terhadap harga transaksi jual beli tanah dan bangunan menyebabkan peningkatan Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

16) Analisis Kinerja Sasaran 16: "Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Daerah" dengan indikator Cakupan Fasilitasi CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab) mencapai **608,70%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.54 Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Fasilitasi CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)	persen	10	60,87	608,70%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Fasilitasi CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)

   Berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat ditambah dengan ketidak mampuan Pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut telah mendesak campur tangan korporasi-korporasi besar yang memiliki dana yang cukup besar untuk terlibat aktif dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut. Hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah konsep Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Public Relations, sebagai ujung tombak perusahaan turut mengemban fungsi ini. Sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu mengemban tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial inilah yang kemudian dijalankan salah satunya melalui program CSR. Disamping itu, CSR juga dipandang sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam pembentukan citra perusahaan. CSR yang berhasil adalah CSR yang didalamnya ada partisipasi dari masyarakat serta dilaksanakan berkelanjutan (sustainable).

   Di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019 terdapat sebanyak 161 perusahaan, yang terbagi dalam 3 (tiga) sektor yaitu sektor perkebunan

sebanyak 51 perusahaan, sektor pertambangan sebanyak 78 perusahaan dan sektor bidang jasa lainnya sebanyak 32 perusahaan.

Ada sebanyak 98 perusahaan yang melaksanakan CSR yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk menghitung Cakupan Fasilitasi CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab) adalah jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR dibagi jumlah seluruh perusahaan dikali seratus, sehingga diperoleh 60,87%.

Target sasaran ini pada Tahun 2019 sebesar 10%, sehingga dengan membandingkan antara realisasi dan target, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 608,70%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.55 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	CakupanFasilitasi CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)	persen	-	-	-	60,87	17

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.56 Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Kerjasama Pembiayaan Pembangunan Daerah	-	-	-

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah 0 (tidak ada anggaran) dari anggaran sebesar 0 (tidak ada anggaran) atau 0%. Realisasi keuangan sebesar 0 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 608,70%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan perusahaan, hal ini menyebabkan dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap program-program yang ditawarkan pemerintah dalam pembangunan daerah, baik untuk infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat.
2. Adanya bentuk penghargaan dari pemerintah berupa CSR AWARD yang diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kewajiban CSR nya kepada masyarakat.
3. Tingkat dan cakupan kesuksesan program dalam mengatasi masalah dari kebutuhan sosial dan ekonomi.
4. Faktor inovasi pada program yg menilik strategi apa saja yg diadopsi untuk mengatasi masalah.
5. Kemudahan penerapan dan duplikasi metode mengentaskan masalah.
6. Kemudahan utk diukur, artinya program dapat diukur tingkat keberhasilannya sehingga mampu utk dikembangkan potensinya.

17) Analisis Kinerja Sasaran 17: "Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, Dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, Dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas" dengan indikator Pertumbuhan Sektor Pertanian mencapai **51,84%** dan termasuk predikat **"kurang berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.57 Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan Sektor Pertanian	persen	9,24	4,79	51,84%

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Sektor Pertanian

Dalam meningkatnya produktifitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan pertumbahan sektor pertanian dengan target RPJMD 2019 sebesar 9,24%. Realisasi target Pertumbuhan Sektor Pertanian 4,79%. Berdasarkan hal tersebut maka capaian Kinerja sebesar 51,84%. Capaian kinerja Tahun 2019 menurun sebanyak 4,45% dari Tahun 2018 yang mencapai 6,86%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.58 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Pertumbuhan Sektor Pertanian	persen	2,34	4,56	6,86	4,79	11,12

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.59 Program dan Anggaran Sasaran 17 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	6.328.566.000,00	5.689.397.309,00	89,90
2.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	5.497.950.000,00	4.371.273.100,00	79,51
3.	Program Revolusi Jagung	9.493.858.860,00	7.578.261.402,00	79,82
4.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	10.137.337.000,00	4.387.642.202,00	43,28
5.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	100.000.000,00	97.785.000,00	97,79
6.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
7.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	7.527.931.000,00	6.538.531.092,00	86,86
8.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penyuluhan	350.000.000,00	280.784.000,00	80,22
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	4.659.065.000,00	2.697.616.585,00	57,90
10.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	24.300.339.384,00	18.277.655.046,00	75,22
11.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	11.426.158.070,00	9.726.600.670,00	85,13
12.	Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP	1.692.753.000,00	1.194.726.052,00	70,58
13.	Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	2.034.601.824,00	1.939.943.000,00	95,35
14.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	315.000.000,00	310.301.900,00	98,51

15.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	200.000.000,00	199.940.000,00	99,97
16.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
17.	Program Perluasan Komoditas Perkebunan	4.725.000.000,00	3.340.515.367,00	70,70
18.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	1.418.005.000,00	1.325.207.278,00	93,46
19.	Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	479.323.400,00	465.597.104,00	97,14
20.	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	350.000.000,00	349.846.869,00	99,96
21.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	644.029.000,00	600.951.500,00	93,31
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	877.220.000,00	841.061.250,00	95,88
23.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	815.000.000,00	750.182.500,00	92,05
24.	Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian	13.852.720.961,00	12.612.880.304,00	91,05
25.	Program Pengembangan Kawasan/Desa/Kimtrans	610.000.000,00	445.101.850,00	72,97
TOTAL		**108.079.858.499,00**	**84.266.801.380,00**	**77,97**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 84.266.801.380,00 dari anggaran sebesar 108.079.858.499,00 atau 77,97%. Realisasi keuangan sebesar 77,97% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 51,74%, maka terjadi ketidak efisiensian dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena lebih besar penggunaan anggaran dibanding capaian kinerja sasaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran antara lain:

1. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian di tahun 2019 dikarenakan penurunan produksi/ kontraksi di sub kategori kehutanan dan penebangan kayu diangka - 3,58. Selain daripada itu sub sektor kehutanan dan penebangan kayu bukan wewenang kabupaten sedangkan sub sektor pertanian, perternakan tumbuh 3,60 dan sub sektor perikanan tumbuh 7,91.
2. Sektor pertanian belum mendapat perhatian yang maksimaal, sehingga hasil yang diperoleh masih rendah, harus ada fokus apa yang akan pemerintah lakukan untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian, dengan melibatkan semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat.

18) Analisis Kinerja Sasaran 18: "Meningkatnya Potensi Dan Daya Dukung Pariwisata Daerah Serta Kunjungan Wisata Di Kutai Kartanegara"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Potensi Dan Daya Dukung Pariwisata Daerah Serta Kunjungan Wisata Di Kutai Kartanegara" dengan indikator Pertumbuhan Sektor Pariwisata **151,45%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.60 Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	persen	7.89	11,95	151,45%

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian dapat berupa menciptakan atau menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar di lingkungan dimana industri itu berdiri seperti dalam usaha akomodasi, restoran, pemandu wisata, seniman, biro perjalanan dan jasa lainnya. Industri pariwisata juga memberikan kontribusi langsung terhadap sektor lain berupa usaha – usaha pembuatan atau perbaikan jalan raya, pelabuhan, bandara, program kebersihan dan kesehatan yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan.

Metode yang digunakan untuk menghitung Pertumbuhan Sektor Pariwisata menggunakan angka perhitungan model proyeksi berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Sektor Pariwisata mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 6,72% di Tahun 2018 menjadi 11,95% di Tahun 2019, atau meningkat sebesar 5,23%. Target Pertumbuhan Sektor Pariwisata Tahun 2019

sebesar7,89%, dengan capaian sebesar 11,95%, sehingga presentase capaian kinerja Pertumbuhan Sektor Pariwisata Tahun 2019 mencapai 151,45%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.61 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	persen	6,65	4,17	6,72	11,95	9,44

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.62 Program dan Anggaran Sasaran 18 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Destinasi Wisata	5.710.000.000,00	4.556.392.901,00	79,80
2.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	955.041.000,00	846.854.676,00	88,67
3.	Program Pengembangan Kemitraan	530.000.000,00	436.412.154,00	82,34
4.	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisataan	11.275.558.699,00	5.505.899.795,00	48,83
5.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.845.000.000,00	4.294.170.754,00	88,63
6.	Program Pembinaan Industri Pariwisata	265.000.000,00	262.493.400,00	99,05
TOTAL		**23.580.599.699,00**	**15.902.223.680,00**	**67,44**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 15.902.223.680,00 dari anggaran sebesar Rp. 23.580.599.699,00 atau 67,44%. Realisasi keuangan sebesar 67,44% dibandingkan dengan capaian kinerja

sasaran sebesar 151,45%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Adanya perhatian yang serius untuk mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pengembangan destinasi wisata mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata sehingga memberi dampak yang besar dalam perekonomian masyarakat, yang berimbas pada meningkatnya PDRB sektor pariwisata.

19) Analisis Kinerja Sasaran 19: "Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata Dan Kelestarian Tradisi"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata Dan Kelestarian Tradisi" dengan indikator Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai **72,33%** dan termasuk predikat **"berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.63 Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya	Persen	3.00	2,17	72,33%

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya

   Adapun jumlah Kelompok seni dan budaya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.64 Rekapitulasi Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Tahun 2018 s/d 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Anggana	2	2
2.	Marang Kayu	11	11
3.	Muara Badak	2	3
4.	Sanga-sanga	3	3
5.	Muara Jawa	2	2
6.	Samboja	7	7
7.	Loa Janan	14	14
8.	Loa Kulu	39	39
9.	Tenggarong	44	44
10	Tenggarong Seberang	28	28
11.	Sebulu	11	11
12.	Muara Kaman	11	12
13.	Kota Bangun	4	6
14.	Muara Wis	2	2
15.	Muara Muntai	1	1
16.	Kenohan	1	1
17.	Kembang Janggut	-	-
18.	Tabang	2	2
Jumlah		184	188

Indikator Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya sebagai salah satu indikator untuk mencapai Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata Dan Kelestarian Tradisi.

Dari data diatas maka diperoleh Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019 :

$$\text{Pertumbuhan Group Seni dan Budaya} = \frac{\text{Jumlah Group Seni Budaya Tahun 2019} - \text{Jumlah Group Seni Budaya Tahun 2018}}{\text{Jumlah Group Seni Budaya Tahun 2018}} x\ 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Group Seni dan Budaya} = \frac{188 - 184}{184}\ x\ 100$$

$$\textbf{Pertumbuhan Group Seni dan Budaya} = \mathbf{2,17}\%$$

Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019 sebesar 2,17%, capaian ini masih kurang atau tidak mencapai target sebesar 3%. Jika membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang ini dicapai Tahun 2019, maka diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 72,33%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.65 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya	Persen	90	-	-	2,17	5

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.66 Program dan Anggaran Sasaran 19 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.848.000.000,00	1.409.349.045,00	76,26
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.399.691.314,00	997.336.600,00	41,56
TOTAL		**4.247.691.314,00**	**2.406.685.645,00**	**56,66**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 2.406.685.645,00 dari anggaran sebesar Rp. 4.247.691.314,00 atau 56,66%. Realisasi keuangan sebesar 56,66% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 72,33%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Karena capaian kinerja tidak sampai 100%, walaupun realisasi anggarang lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Faktor anggaran, karena pada Tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak ada anggaran untuk pengembangan kelompok seni budaya. Baru di Tahun 2019 tersedia anggaran untuk pembinaan kesenian.
2. Tidak meratanya sebaran seniman, yang berkembang hanya daerah perkotaan.
3. Masih minimnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni dan budaya.

20) Analisis Kinerja Sasaran 20: "Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Industri Kreatif Dan Potensi Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Berbasisindustrikreatifdanpotensi Daerah" dengan indikator Persentase Koperasi Aktif dan Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM mencapai **97,83%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.67 Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	81.23	81,85	100,75%
2.	Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM	Persen	3.13	2,97	94,89%
Rata-rata Capaian					97,83%

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase Koperasi Aktif**

   Untuk menghitung presentase koperasi aktif menggunakan cara peritungan jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi di kali seratus. Pada Tahun 2019 terdapat 505 koperasi aktif dari 617 jumlah seluruh koperasi, sehingga diperoleh presentase koperasi aktif sebesar 81,85%.

   Presentase Koperasi Aktif Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,55%, dari 81,30% pada Tahun 2018, menjadi 81,85 di tahun 2019. Dari 617 jumlah seluruh koperasi, hanya 505 koperasi aktif, karena ada 112 koperasi yang tidak aktif yang diusulakn untuk pembubarannya.

   Pada tabel berikut disajikan presentase koperasi aktif dari tahun ke tahun :

Grafik 3.9 Persentase Koperasi Aktif 2013 s/d 2019

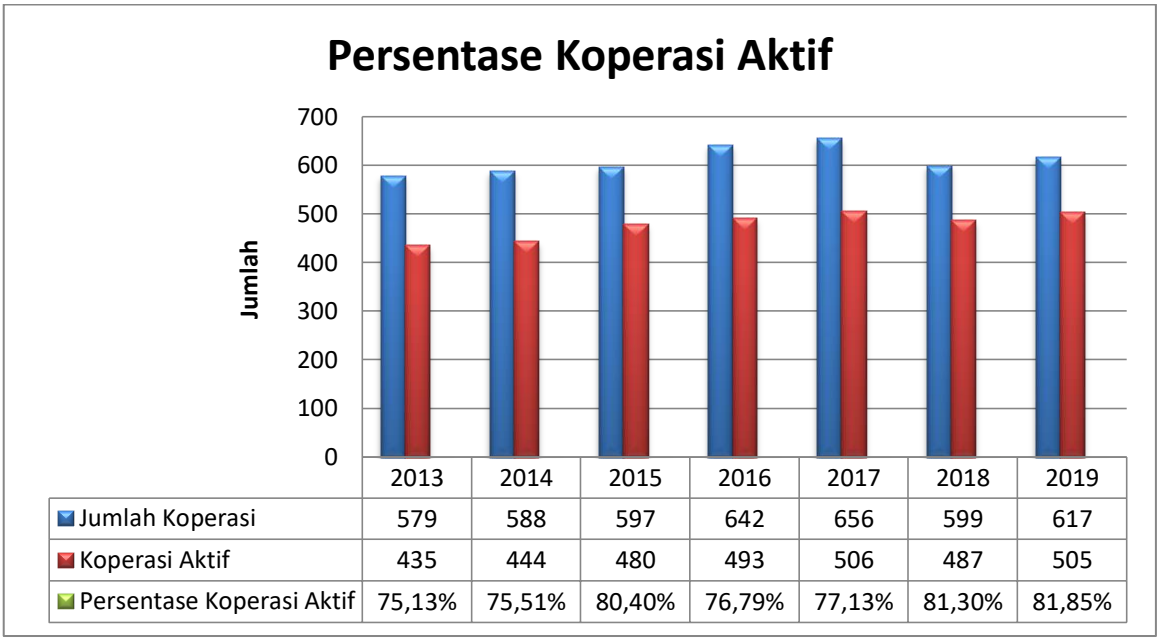

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Berikut data koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019 :

Tabel 3.68 Data Jumlah Koperasi Tahun 2019

No.	Kecamatan	Koperasi			Kop. Baru	Rat
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah		
1	Tabang	19	14	33	1	11
2	Kembang Janggut	30	3	33	-	17
3	Kenohan	12	2	14	1	7
4	Muara Wis	5	1	6	-	3
5	Kota Bangun	20	6	26	-	5
6	Muara Kaman	38	11	49	2	16
7	Muara Muntai	12	5	17	1	3
8	Sebulu	33	13	46	1	10
9	Tenggarong	101	51	152	2	20
10	Tenggarong Seberang	27	11	38	-	7
11	Loa Kulu	37	8	45	1	13
12	Loa Janan	21	14	35	2	3
13	Sangasanga	12	17	29	-	-
14	Muara Jawa	22	8	30	1	7
15	Samboja	38	8	46	2	9
16	Anggana	18	3	21	-	6
17	Muara Badak	27	5	32	-	3
18	Marangkayu	15	3	18	-	2

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

2. Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM

Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM diperoleh dari Jumlah Usaha Mikro Kecil Yang naik kelas dibandingkan dengan Total seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada. Berikut di sampaikan data terkait Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 :

Grafik 3.10 Pertumbuhan Tingkat Kelas UKM Tahun 2019

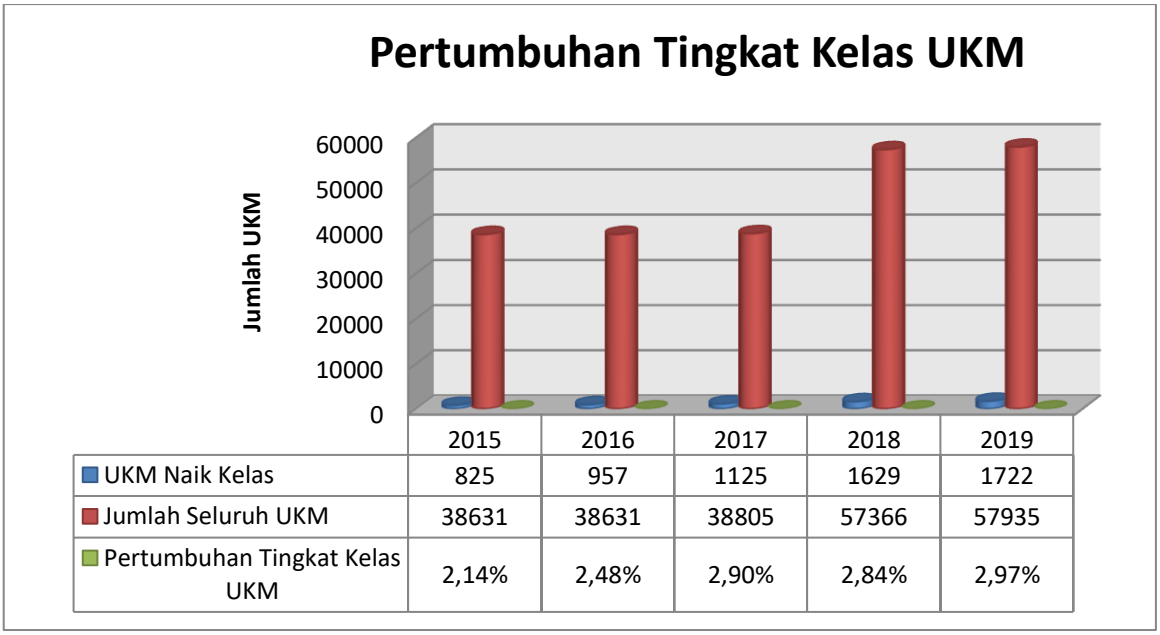

	2015	2016	2017	2018	2019
UKM Naik Kelas	825	957	1125	1629	1722
Jumlah Seluruh UKM	38631	38631	38805	57366	57935
Pertumbuhan Tingkat Kelas UKM	2,14%	2,48%	2,90%	2,84%	2,97%

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM Tahun 2019 sebesar 2,97 % , dengan kenaikan jumlah UMKM yang naik kelas sebanyak 93 UKM di bandingkan dengan jumlah UKM di Tahun 2018, sebagaimana dapat dilihat perkembangannya sebagai berikut :

Tabel 3.69 Perkembangan UKM sesuai klasifikasi usaha

NO	URAIAN	TAHUN					KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	2019	
I	**JENIS USAHA**						
	1 MIKRO						
	SALDO AWAL (BULAN JANUARI)	**37.806**	**37.806**	**37.674**	**37.680**	**55.737**	
	PERTUMBUHAN						
	A KULINER	2.010	-	51	23	299	
	B FASION	1.021	-	10	-	43	
	C PENDIDIKAN	5	-	0	-	2	
	D OTOMOTIF	222	-	5	-	1	

	E	AGROBISNIS	4.329	-	16	18.512	6	
	F	TEKNOLOGI INTERNET	8	-	1	-	1	
	G	BIDANG LAIN	30.211	-	91	26	217	
II	**JUMLAH PERTUMBUHAN MIKRO**		-	-	**174**	**18.561**	**569**	
	JUMLAH USAHA MIKRO (BULAN DESEMBER)		**37.806**	**37.674**	**37.680**	**55.737**	**56.306**	
	2	**KECIL**						
	SALDO AWAL (BULAN JANUARI)		825	825	957	1.125	1.629	
	PERTUMBUHAN							
	A	KULINER	104	9	3	7	-	
	B	FASION	52	3	3	1	-	
	C	PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	
	D	OTOMOTIF	50	8	7	1	-	
	E	AGROBISNIS	35	2	7	374	-	
	F	TEKNOLOGI INTERNET	-	-	3	-	-	
	G	BIDANG LAIN	584	110	145	121	93	
iIII	**JUMLAH PERTUMBUHAN KECIL**		**-**	**132**	**168**	**504**	**93**	**Naik Kelas**
	JUMLAH USAHA KECIL (BULAN DESEMBER)		825	957	1.125	1.629	1.722	
	JUMLAH USAHA MIKRO KECIL (BULAN DESEMBER)		**38.631**	**38.631**	**38.805**	**57.366**	**57,935**	

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.70 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	81,62	77,13	81,30	81,85	81,43
2.	Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM	Persen	2,15	2,89	2,84	2,97	3,78

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.71 Program dan Anggaran Sasaran 20 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.200.970.755,97	922.437.900,00	76,81
2.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	843.815.000,00	708.756.164,00	83,99

3.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	349.500.000,00	303.833.191,00	86,93
TOTAL		**2.394.285.755,97**	**1.935.027.255,00**	**80,82**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 1.935.027.255,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.394.285.755,97 atau 80,82%. Realisasi keuangan sebesar 80,82% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,83%, maka terjadi kurang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena capaian kinerja masih di bawah 100%, walaupun realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Karena keinginan masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah melalui pendampingan, sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami tentang perkoperasian.
2. pembinaan UMKM selain dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan APBD juga melibatkan dukungan pihak ke tiga yaitu pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Kemudian memberi manfaat kepada masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Maka Dinas Koperasi dan UKM dalam pembinaan pelaku UMKM melakukan kerjasama dengan kementrian, lembaga dan perusahaan melalui CSR untuk kegiatan yang tidak dibiayai pemerintah (Non APBD)

selain faktor – faktor pendukung, terdapat juga faktor yang mempengaruhi terhambatnya pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
2. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.
3. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.
4. Pembinaan hubungan antara ala perlengkapan koperasi, khususnya antara pengurus dan manajer , yang yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain mengingat perlunya koordinasi yang mantap dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas. Harus dihindarkan apabila ada pengurus yang mengambil wewenang manajer melaksanakan tugas operasional.
5. Kebijaksanaan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul sebagai prakarsa pemerintah. Program-program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhana anggota masih ada yang belum sepenuhnya dipadukan dengan program-program yang timbul dari prakarsa pemerintah. Keputusan koperasi yang mandiri masih belum dapat berkembang.
6. Pelaku yang sudah mendapat binaan tidak melaporkan perkembangan usahanya;
7. Pembina khususnya Dinas Koperasi dan UKM belum mampu melakukan monitoring terhadap para pelaku usaha disebabkan :
   - Keterbatasan SDM khususnya untuk petugas lapangan;
   - Wilayah Kab. Kukar yang cukup luas tentunya memerlukan biaya yang cukup besar untuk mendukung kegiatan ini.

21) Analisis Kinerja Sasaran 21: "Meningkatnya Akses, Tata Niaga, Dan Infrastruktur Perdagangan Antar Wilayah Dan Antar Daerah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Akses, Tata Niaga, Dan Infrastruktur Perdagangan Antar Wilayah Dan Antar Daerah" dengan indikator Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara mencapai **45%** dan termasuk predikat **"kurang berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.72 Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara	Persen	9,00	4,05	45%

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara

Neraca perdagangan Pemerintah kabupaten Kutai kartanegara pada tahun 2018 tercatat surplus yang tinggi dengan presentase sebesar 84,44% hal ini dipengaruhi karena adanya surplus dari sektor migas sebesar 62,60% dan surplus dari non migas sebesar 88,29%.

Neraca perdagangan Pemerintah kabupaten Kutai kartanegara pada Tahun 2019 tercatat mengalami penurunan surplus dengan persentase sebesar 1,41% hal ini dipengaruhi karena adanya defisit yang besar dari sektor migas dengan persentase sebesar -65,16%, adapun surplus yang juga turun dari tahun sebelumnya dari sektor non migas sebesar 11,56%.

Realisasi Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019 sebesar 4,05%, jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 9%, maka capaian kinerja sebesar 45%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.73 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara	Persen	7	7	7	4,05	7

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.74 Program dan Anggaran Sasaran 21 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6.920.680.000,00	5.799.091.849,00	83,79
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	224.694.166,00	196.447.500,00	87,43
3.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	150.000.000,00	93.953.000,00	62,64
4.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	525.000.000,00	470.024.644,00	89,53
TOTAL		**7.820.374.166,00**	**6.559.516.993,00**	**83,88**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 6.559.516.993,00 dari anggaran sebesar Rp. 7.820.374.166,00 atau 83,88%. Realisasi keuangan sebesar 83,88% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 45%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan pencapaian sasaran antara lain menurunnya jumlah ekspor komoditi non migas seperti permintaan komuditas kayu yang turun drastis.

22) Analisis Kinerja Sasaran 22: "Meningkatnya Pengembangan Industri Pengolahan Pangan, Peternakan, Perikanan, Pengolahan Pakan, Dan Potensi Daerah Yang Berdaya Saing"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pengembangan Industri Pengolahan Pangan, Peternakan, Perikanan, Pengolahan Pakan, Dan Potensi Daerah Yang Berdaya Saing" dengan indikator Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai **29%** dan termasuk predikat **"kurang berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.75 Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	persen	7.03	2,05	29%

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.76 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	persen	8,48	4,27	4,27	2,05	8,13

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.77 Program dan Anggaran Sasaran 22 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Sentra – sentra Industri Potensial	100.000.000,00	67.150.400,00	67,15
2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.845.000.000,00	1.069.734.485,00	57,98
3.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1.496.637.000,00	900.100.300,00	60,14
TOTAL		3.441.637.000,00	2.036.985.185,00	59,19

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 2.036.985.185,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.441.637.000,00 atau 59,19%. Realisasi keuangan sebesar 59,19% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 29%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Karena realisasi anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya pencapaian sasaran yaitu masih rendahnya investasi sektor industri pengolahan, sehingga menyebabkan pertumbuhan industri sektor pengolahan menjadi sangat rendah.

23) Analisis Kinerja Sasaran 23: "Meningkatnya Interkoneksitas Antar Wilayah"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Interkoneksitas Antar Wilayah" dengan indikator Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik mencapai **101,16%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.78 Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik	persen	86.80	87,81	101,16%

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik**

   Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 1.925,72 KM dibagi (2019) panjang jalan seluruh kabupaten 2.193,02 KM (2019) dikali 100. Jadi cakupan persentass jalan dengan kondisi baik yang di target pada tahun 2019 sebesar 87,81%.

   Target Persentase Jalan dengan Kondisi Baik Tahun 2019 sebesar 86,80%, dengan realisasi 87,81%, maka capaian kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 106,67%. Capaian kinerja Tahun 2019 lebih tinggi dari Tahun 2018 yaitu 1,95%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.79 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik	persen	83,55	83,75	85,86	87,81	100

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.80 Program dan Anggaran Sasaran 23 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	14.700.000.000,00	4.587.087.200,00	31,20
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	85.750.707.000,00	51.444.661.511,00	59,99
3.	Program peningkatan Jalan dan Jembatan	482.583.285.558,05	415.405.874.666,00	86,08
4.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	269.867.000,00	241.136.100,00	89,35
5.	Program Pengendalian Banjir	7.950.000.000,00	5.537.837.500,00	69,66
6.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7.764.836.250,00	7.313.040.609,00	94,18
7.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	3.278.812.000,00	3.031.282.836,00	92,45
8.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	22.750.000.000,00	21.750.022.707,00	95,60
9.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	1.500.000.000,00	1.050.014.000,00	70,00
10.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13.572.666.000,00	7.897.374.615,00	58,19
11.	Program Perencanaan Tata Ruang	17.707.947.650,00	16.803.076.400,00	94,89
12.	Program Pemanfaatan Ruang	3.000.000.000,00	1.866.178.480,00	62,21
13.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.601.858.740,00	1.479.271.850,00	92,35
14.	Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara	70.953.069.700,00	59.716.276.862,00	84,16

15.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	14.139.616.699,22	13.158.847.640,00	93,06
16.	Program Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	22.741.035.668,00	22.048.806.436,00	96,96
17.	Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasasarana Umum Kecamatan	15.489.523.033,22	13.236.012.083,00	85,45
18.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	1.498.500.000,00	1.322.608.600,00	88,26
19.	Program Pembangunan Turap Kecamatan	7.653.214.930,00	7.577.589.300,00	99,01
20.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	159.937.180.536,09	153.508.653.152,00	95,98
21.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	3.201.000.000,00	3.012.842.400,00	94,12
22.	Program Pemanfaatan Ruang	3.000.000.000,00	1.791.499.338,00	59,72
TOTAL		**958.043.120.764,58**	**811.913.815.805,00**	**84,75**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 1.002.189.763.226,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.175.463.409.245,58 atau 85,26%. Realisasi keuangan sebesar 85,26% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,16%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Tingginya komitmen pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur, terutama untuk wilayah – wilayah diluar Kecamatan Tenggarong yang selama ini masih sangat kecil presentase jalan dengan kondisi baik.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain.
3. Membaiknya perekonomian, sehingga pendapatan dari daerah meningkat, sehingga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur juga lebih besar.

24) Analisis Kinerja Sasaran 24: "Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan" dengan indikator Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah mencapai **123,47%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.81 Realisasi Indikator Sasaran 24 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah	Persen	75.00	92,60	123,47%

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah

Capaian kinerja Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah dengan mengolah data yang berasal dari 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk data Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah dari Dinas Pekerjaan Umum adalah Jumlah Desa/ Kelurahan yang terhubung ke ibukota kecamatan dibagi total jumlah desa ditambah ibukota kecamatan yang terhubung dengan ibu kota kabupaten dibagi jumlah total kecamatan dibagi dua dikali seratus. Dengan formulasi perhitungan maka diperoleh :

$$\text{Total Desa dan Kelurahan terhubung} = \frac{223}{237} = 0{,}940$$

$$\text{Total kecamatan terhubung} = \frac{16}{18} = 0{,}888$$

$$\text{Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah} = \frac{0{,}940 + 0{,}888}{2}\ x\ 100 = 91{,}40\%$$

Untuk Cakupan aksesibilitas antar wilayah dari Dinas Perhubungan, memformulasikan capaian kinerja dengan Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2019 terhadap Cakupan aksesibilitas antar wilayah dari Dinas Perhubungan, sebesar 93,80%.

Dengan data yang diperoleh dari dua perangkat daerah diatas maka diperoleh capaian kinerja Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah pada Tahun 2019 sebesar 92,60% atau mencapai 123,47%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,04% dari tahun lalu sebesar 85,56%.

Tabel 3.82 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 24 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Cakupan Aksesbilitas Antar Wilayah	Persen	77,8	77,8	85,56	92,60	87,5

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.83 Program dan Anggaran Sasaran 24 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program peningkatan pelayanan angkutan	3.050.000.000,00	2.877.084.310,00	94,33
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitasi LLAJ	4.670.000.000,00	4.321.663.088,00	92,54
3.	Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	14.524.838.818,00	13.670.625.760,00	94,12
4.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	13.330.000.000,00	12.743.931.791,00	95,60
5.	Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor	2.550.000.000,00	2.504.020.369,00	98,20
TOTAL		**38.124.838.818,00**	**36.117.325.318,00**	**94,73**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 36.117.325.318,00 dari anggaran sebesar Rp. 38.124.838.818,00 atau 94,73%. Realisasi keuangan sebesar 94,73% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 123,47%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Tingginya komitmen pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur, sehingga membuka akses terhubung antar wilayah.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain.
3. Membaiknya perekonomian, sehingga pendapatan dari daerah meningkat, sehingga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur juga lebih besar.

25) Analisis Kinerja Sasaran 25: "Terwujudnya Koneksitas Jaringan Komunikasi, Internet, Dan Pengembangan Kawasan Smart City"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Koneksitas Jaringan Komunikasi, Internet, Dan Pengembangan Kawasan Smart City" dengan indikator Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/Desa/Kelurahan mencapai **103,90%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.84 Realisasi Indikator Sasaran 25 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Persen	80,00	83,12	103,90%

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/ Desa/ Kelurahan

Secara Umum jaringan internet sudah terjangkau di 18 Kecamatan, dari data Tahun 2018 ada sebanyak 71 Desa yang belum terjangkau koneksi internet (blankspot) atau sekitar 30% dari jumlah total desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengurangan jumlah blankspot pada Tahun 2019 sebesar 31 desa, sehingga masih terdapat 40 desa/ kelurahan yang masih blankspot atau sekitar 17%.

Untuk menghitung cakupan koneksi internet kecamatan/ desa/ kelurahan adalah dengan formulasi jumlah desa/ kelurahan yang terjangkau koneksi internet dibagi jumlah seluruh desa dikali seratus. Jumlah desa/ kelurahan yang sudah terjangkau koneksi internet sebanyak 197 desa/ kelurahan, dari total desa/ kelurahan sebanyak 237, sehingga Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Tahun 2019 mencapai 83,12%, dari target tahun 2019 sebesar 80%, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 103,90%.

Realisasi indkator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.85 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 25 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Persen	69,17	73,84	78,79	83,12	100

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.86 Program dan Anggaran Sasaran 25 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1.157.363.900,00	1.124.969.005,00	97,20
2.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.907.960.653,11	1.721.330.524,00	59,19
3.	Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	250.000.000,00	185.659.226,00	74,26
TOTAL		**4.315.324.553,11**	**3.031.958.755,00**	**70,26**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 3.031.958.755,00 dari anggaran sebesar Rp. 4.315.324.553,11 atau 70,26%. Realisasi keuangan sebesar 70,26% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,90%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Pemerintah terus melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait membuka akses atau mengurangi desa/ kelurahan yang belum terjangkau koneksi internet.
2. Operator penyedia layanan jaringan seluler/ GSM tetap menilai dari segi keuntungan ekonomi, sehingga proses pembuka koneksi jaringan internel lambat pengembangannya di desa yang jumlah penduduknya minim serta tidak ada aktivitas perekonomian yang menonjol di desa tersebut.

26) Analisis Kinerja Sasaran 26: "Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan Dan Kawasan Permukiman"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan Dan Kawasan Permukiman" dengan indikator Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi, Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai **94,93%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.87 Realisasi Indikator Sasaran 26 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	Kawasan	1	1	100%
2.	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0	0,006	99,40%
3.	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga	Persen	100	85,39	85,39%
Rata – rata Capaian					**94,93%**

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi

Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2019, terdapat 1 kawasan yaitu di Kecamatan Tenggarong, sebagai pusat kota kabupaten. Pengembangan kawasan ini di dukung oleh kegiatan implementasi Smart Regency/ City. Walaupun capaian kinerja telah mencapai 100% dari apa yang telah ditargetkan di Tahun 2019, namun minimnya infrastruktur untuk mendukung ketersediaan kawasan berbasis teknologi informasi, masih menjadi kendala untuk pengembangan kawasan ini.

2. Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Bupati Nomor : 454/SK-BUP/HK/2019, Tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Ada 8 (delapan) kecamatan dan 11 Desa yang menjadi sasaran program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dengan total luas kawasan 168,11 Hektar. Adapun 8 (delapan) Kecamatan tersebut antara lain yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Janan. Sedangkan 11 Desa yang ditangani adalah Kel. Kuala Samboja, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Badak Baru, Desa Loa Kulu Kota, Kel. Loa Ipuh, Kel. Melayu, Kel. Mangkurawang, Desa Manunggal Jaya, Desa Teluk Dalam, Kel. Muara Jawa Pesisir dan Desa Loa Janan Ulu. Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2019 dari segi penanganan mengalami peningkatan lebih kurang 25,46 ha dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 yang hanya sebesar 15,1 ha. Hal ini dipengaruhi oleh program kegiatan KOTAKU dan kegiatan DAK perumahan yang sumber dananya berasal dari APBN. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya sinergitas dari semua pihak baik oleh pemerintahan desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dimana semua berperan dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh. Walaupun demikian masih ada hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja tersebut.

Untuk menghitung capaian kinerja Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh, dengan menggunakan formulasi luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah, sehingga diperoleh hasil :

$$\text{Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh} = \frac{\text{luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{luas wilayah}}$$

$$\text{Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh} = \frac{168{,}11\ \text{Ha}}{27.263{,}10\ \text{Ha}} = 0{,}006\%$$

Dari target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 0% untuk Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh masih belum tercapai 100%, capaian kinerja masih sebesar 99,40%, hal ini yang masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menangani permasalahan lingkungan kumuh.

Realisasi capaian kinerja diliham memang belum ada perubahan dari 2 tahun kebelakang yaitu pada tahun 2017 dan 2018, hal ini dikarenakan masih sedikitnya kawasan yang tertangani yaitu baru sebesar 25,46 ha, namun telah mengalami peningkatan jumlah sebesar 10,36 ha, jika dibandingkan dengan kawasan yang ditangani Tahun 2018 sebesar 15,1ha.

3. Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga

Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga adalah Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih / Jumlah seluruh rumah tangga x 100%. Sumber data berasal dari Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, PDAM Tirta Mahakam Tahun 2019 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan asumsi perhitungan 1 SR(sambungan rumah) = 6 Jiwa.

$$\text{Persentase cakupan layanan air minum rumah tangga} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \; x\; 100 = \frac{190.003}{222.503} \; x\; 100 = 85{,}39\%$$

Untuk Indikator Kinerja persentase cakupan layanan air minum rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 84,88% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 85,39% dengan persentase capaian sebesar 85,39%. Walaupun persentase capaian meningkat setiap tahunnya, tapi masih belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.88 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 26 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	Kawasan	69,17	75,68	77,5	1	2
2.	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0,037	0,006	0,006	0,006	0
3.	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga	Persen	73,53	83,70	84,88	85,38	100

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.89 Program dan Anggaran Sasaran 26 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Perumahan	1.925.000.000,00	1.397.884.150,00	72,62
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	113.230.089.000,00	102.349.244.037,00	90,39
3.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.251.289.000,00	1.834.867.314,00	81,50
TOTAL		**117.406.378.000,00**	**105.581.995.501,00**	**89,93**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 105.581.995.501,00 dari anggaran sebesar Rp. 117.406.378.000,00 atau 89,93%. Realisasi keuangan sebesar 89,93% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,93%, maka terjadi ketidak efisiensian penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena capaian kinerja belum mencapai 100%, namun penggunaan sumber daya sudah lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian sasaran antara lain:

1. Minimnya infrastruktur untuk mendukung ketersediaan kawasan berbasis teknologi informasi, masih menjadi kendala untuk pengembangan kawasan ini.
2. Keterbatasan anggaran menyebabkan cakupan penanganan lingkungan kumuh belum optimal terlaksana.
3. Karena perencanaan yang telah disusun sebagian besar masih belum terakomodir.
4. Ketersediaan dana APBD untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masih jauh dari kebutuhan, sementara seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka Sambungan Rumah (SR) untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun semakin bertambah. Apalagi dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 Km2 dan terdiri dari 18 Kecamatan tentu membutuhkan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit.

27) Analisis Kinerja Sasaran 27 "Meningkatnya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Serta Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Serta Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan" dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai **108,18%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.90 Realisasi Indikator Sasaran 27 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	72	77,89	108,18%

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk capaian kinerja terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari penyajian data di tabel berikut :

Tabel 3.91 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 27 Tahun 2019

Indikator Sasaran	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian 2018	2019			
				Target	Realisasi	%	Predikat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**point**	**IKLH=(indeks kualitas udara x 30%) + (indeks kualitas air x 30%)+(indeks tutupan lahan x 40%)**	**69,92**	**72,00**	**77,89**	**108,18**	**Sangat baik**
Status Pencemaran Sungai	%		81,43	56,37	84,08	149,16	Sangat baik
Status Pencemaran Udara	%		69,51	92,10	91,06	98,87	Sangat baik
Tutupan lahan	%		59,95	59,99	62,93	104,90	Sangat baik

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dilihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 yaitu sebesar 77,89 bahkan melebihi target 2019 (72,00) atau realisasinya 108,18 %. dan capaian indeksnya naik 7,97 dibandingkan capaian tahun 2018.

Ukuran capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan, pada tahun 2019 tercapai 77,89. Rincian ketiga indeks tersebut menggunakan parameter :

a. Indeks Kualitas Air

Terdapat 10 parameter yang diuji dalam menentukan indeks kualitas air atau status pencemaran air, yaitu : Zat padat tersupsensi (TSS, Total Suspended Solid), Jumlah Zat padat terlarut (Total Dissolve Solid), Oksigen terlarut (DO, Dissolved Oxigen), Jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai (BOD, Biochemical Oxygen Demand), Kandungna Fosfat (Total Phosphat), Kandungna Bakteri Escherichia coli,Kandungan bakteri koliform (Total Coliform), Kandungan NH3-N (Nitrogen Amoniak), Kandungan N03-N (Nitrat).

Uji air permukaan yang dilakukan di 10 kecamatan dengan 12 lokasi sungai sebagai titik pantau, yaitu Kecamatan loa kulu dengan 3 lokasi sungai, kecamatan sanga-sanga 1 lokasi sungai, kecamatan anggana 1 titik sungai, kecamatan samboja 1 titik sungai, kecamatan loa janan, kecamatan tenggarong seberang, kecamatan tenggarong, kecamatan marangkayu, kecamatan muara badak dan kecamatan muara jawa masing-masing 1 anak sungai sebagai lokasi titik pantau. Walaupun dari keseluruh titik lokasi tersebut belum mewakili 70 % kawasan sungai namun telah melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan. Dengan hasil indeks kualitas air sebesar 84,08%.

b. Indeks Kualitas Udara

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Udara atau status pencemaran udara tahun 2019 yaitu 91,06%, kurang 1,04 % dari target RPJMD, walaupun tidak memenuhi target namun status pencemaran udara tahun 2019 meningkat dari 2018 sebesar 31 % dengan kualitas udara dalam

kategori BAIK. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilakukan di 2 kecamatan yaitu kecamatan loa janan dan kecamatan tenggarong.

c. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen IKLH, semakin tinggi indeks tutupan lahan makan akan mendongkrak nilai IKLH. Data tutupan lahan menunjukkan meningkatnya Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 yaitu 62,93% dibanding tahun 2018 meningkat indeksnya 2,94%, dari capaian 59,99% di Tahun 2018.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.92 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 27 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	71,03	62,58	69,26	77,89	73,00

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.93 Program dan Anggaran Sasaran 27 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.427.676.050,00	900.135.630,00	63,05
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.540.000.000,00	1.460.530.004,00	94,84
3.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.459.184.550,00	1.924.612.581,00	78,26
4.	Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan raya dan Pelestarian Lingkungan	1.106.258.000,00	58.067.200,00	5,25
5.	Program Rehabilitasi Lahan Kritis	2.587.183.505,00	1.086.298.300,00	41,99
TOTAL		**9.120.302.105,00**	**5.429.643.715,00**	**59,53**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 5.429.643.715,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.120.302.105,00 atau 59,53%. Realisasi keuangan sebesar 59,53% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 108,18%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Untuk menanggulangi menurunya status pencemaran air perlu meningkatkan upaya dari masyarakat dan pemerintah untuk menganggulangi pencemaran air sungai , misalnya dengan memperbanyak gerakan bersih sungai. Dan diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah cair yang baik dan benar, baik untuk limbah industri maupun limbah rumah tangga sebelum dialirkan ke lingkungan, dan juga upaya pengawasan pencegahan pencemaran air yang lebih diperketat
2. Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) public, seperti taman kota, taman keanekaragaman hayati, dan penanaman tanaman perindang jalan yang efektif menyerap polutan udara serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Industri/Perusahaan yang menghasilkan emisi cerobong asap agar menaati persyaratan teknis dalam pencegahan pencemaran udara.
3. Melalui peningkatan Indeks Tutupan Lahan, untuk tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan nilai Tutupan Lahan melalui peningkatan ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

28) Analisis Kinerja Sasaran 28: "Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan" dengan indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan mencapai **152,44%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.94 Realisasi Indikator Sasaran 28 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan	Persen	3,89	5,93	152,44%

Sumber data: Dinas Enargi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan**

   Untuk capaian Indikator Presentase Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan pada Tahun 2019 sebesar 5,93 % dari target 3,98%, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja mencapai 152,44% tabel Data Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.95 Data Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah		RT/ KK Berlistrik		%KK ENERGI BARU TERBARUKAN
		Desa/Kel	KK	PLN	EBT	
1	Tabang	19	3536	1894	799	22,60%
2	Kembang janggut	11	8435	5315	8864	105,09%
3	Kenohan	9	4720	3553	672	14,24%
4	Muara Wis	7	3153	2007	213	6,76%
5	Kota Bangun	21	11462	9007	728	6,35%
6	Muara Muntai	13	5912	3958	0	0,00%
7	Muara Kaman	20	12380	8933	836	6,75%
8	Loa Kulu	15	13020	11583	0	0,00%
9	Sebulu	14	12574	10826	0	0,00%
10	Marangkayu	11	7684	6253	0	0,00%

11	Tenggarong Seberang	18	18587	18302	0	0,00%
12	Muara Badak	13	15242	11408	0	0,00%
13	Anggana	8	11857	10299	467	3,94%
14	Tenggarong	14	28036	24398	0	0,00%
15	Sanga Sanga	5	5985	4566	0	0,00%
16	Muara Jawa	8	13295	10936	0	0,00%
17	Loa Janan	8	16236	14646	0	0,00%
18	Samboja	23	20008	18694	0	0,00%
TOTAL		**237**	**212122**	**176578**	**12579**	**5,93%**

Sumber data: Dinas Enargi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.96 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 28 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan	Persen	5,89	5,89	5,89	5,93	5,00

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.97 Program dan Anggaran Sasaran 28 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	600.000.000,00	374.728.656,00	62,45
2.	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	700.000.000,00	605.821.552,00	86,55
3.	Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	471.008.375,00	426.421.255,00	90,53
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi	350.000.000,00	344.825.600,00	98,52
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	200.000.000,00	195.466.240,00	97,73
6.	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	17.325.161.500,00	15.636.987.784,00	90,26
TOTAL		**19.646.169.875,00**	**17.584.251.087,00**	**89,50**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 17.584.251.087,00 dari anggaran sebesar Rp. 19.646.169.875,00 atau 89,50%. Realisasi keuangan sebesar 89,50% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 152,44%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kearah pembangunan PLTS Komunal tidak menggunakan PLTS Solar Home System (SHS)/PLTS tersebar.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM melakukan moratorium untuk pembangunan PLTS Komunal.
3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk Pembangunan PLTS Komunal terhadap wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

29. Analisis Kinerja Sasaran 29: "Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender, Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak"

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender, Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak" dengan indikator IPG, IDG, Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yangmendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Pertugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%), dan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai **99,39%** dan termasuk predikat **"sangat berhasil"** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.98 Realisasi Indikator Sasaran 29 Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	IPG	Persen	86.00	79,14	92,02%
2.	IDG	Persen	56.29	56,44	100,27%
3.	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Pertugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	Persen	100.00	98,35	98,35%
4.	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Kasus Kekerasan	130	121	106,92%
Rata-rata Capaian					**99,39%**

Sumber data: BPS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. IPG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 86,00% tetapi sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar 79,14% dengan capaian komposit sebagai berikut :

a) Rata – rata harapan sekolah Perempuan terealisasi sebesar 13,63

b) Rata – rata lama sekolah perempuan terealisasi sebesar 8,18

c) Angka harapan hidup perempuan realisasi sebesar 73,81

d) Pengeluaran perempuan realisasi 4.555,00

Grafik 3.11 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 s/d 2019

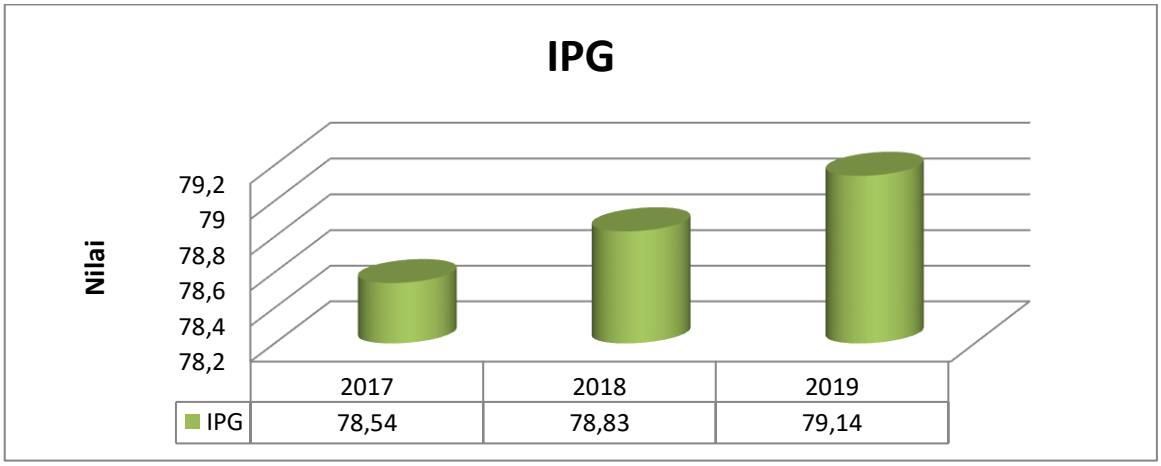

Sumber data: BPS Provinsi kalimantan Timur Tahun 2019

Pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2017 untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan sebesar 82,00 baru terealisasi sebesar 78,54%, tahun 2018 terealisasi sebesar 78,83% terdapat kenaikan realisasi 0,29% dibandingkan pada tahun 2017 dan pada Tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu terealisasi sebesar 79,14%, kenaikan realisasi 0,31% dibandingkan pada tahun 2018.

jika dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar 86% dengan capaian sebesar 79,14%, maka presentase capaian kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 mencapai 92,02%.

Berikut disajikan data capaian IPG Kabupaten Kota se Kalimantan Timur,

berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur :

Grafik 3.12 Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 s/d 2019

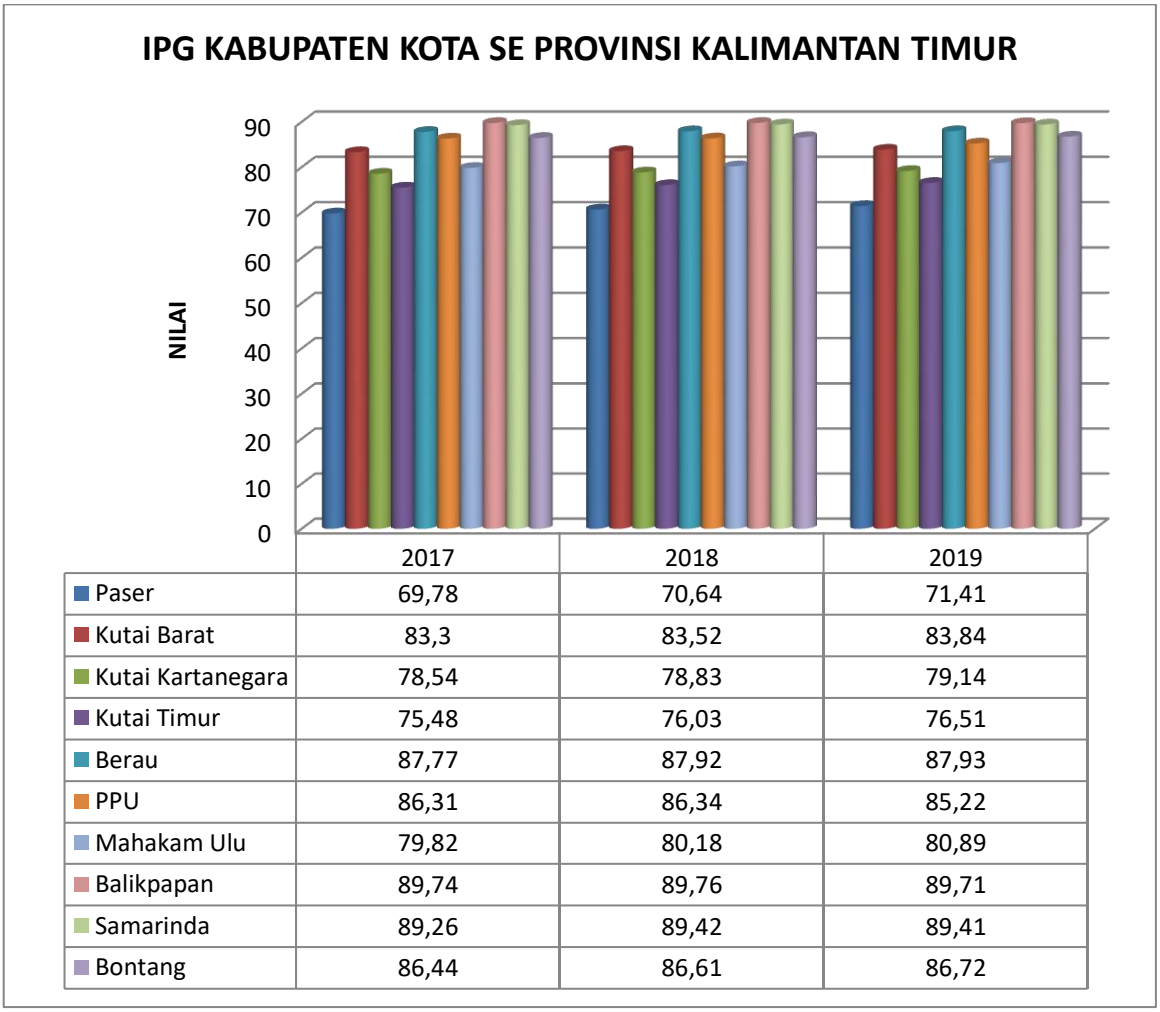

	2017	2018	2019
Paser	69,78	70,64	71,41
Kutai Barat	83,3	83,52	83,84
Kutai Kartanegara	78,54	78,83	79,14
Kutai Timur	75,48	76,03	76,51
Berau	87,77	87,92	87,93
PPU	86,31	86,34	85,22
Mahakam Ulu	79,82	80,18	80,89
Balikpapan	89,74	89,76	89,71
Samarinda	89,26	89,42	89,41
Bontang	86,44	86,61	86,72

Sumber data: BPS Provinsi kalimantan Timur Tahun 2019

2. IDG

Data terkait Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2019, sampai laporan ini di susun, pihak BPS belum mempublis nilai IDG Kabupaten Kutai Kartanegara, ditargetkan pada Tahun 2019 IDG sebesar 56,29%, sehingga pada penyusunan laporan ini, kami masih menggunakan data IDG publis BPS Tahun 2018 yaitu sebesar 56,44%.

Angka 56,44 yang dipengaruhi oleh komposit sebagai berikut :

a) Keterlibatan Perempuan di Parlemen 8,89%

b) Perempuan Sebagai Tenaga Profesional 47,58%

c) Sumbangan Pendapatan perempuan 24,35%

3. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Pertugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)

Pada tahun 2019 dari target 100% (121 kasus) untuk indikator ini terealisasi sebesar 98,35% kasus yang ditangani baik mediasi di kepolisian maupun sudah ada putusan kasus di Pengadilan Negeri Tenggarong, terdapat 2 kasus atau 1,65% kasus yang ditangani dipengadilan yang sampai akhir tahun ini belum ada laporan sampai ketingkat putusan.

Berikut data terkait bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2019 :

Tabel 3.99 Realisasi bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2019

NO.	BENTUK PENYELESAIAN KASUS	JUMLAH
1	PROSES UPT	36
2	MEDIASI	26
3	DIVERSI	7
4	KEPOLISIAN	45
5	KEJAKSAAN	4
6	PENGADILAN	3
	TOTAL	121

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Grafik 3.13 Realisasi bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2019

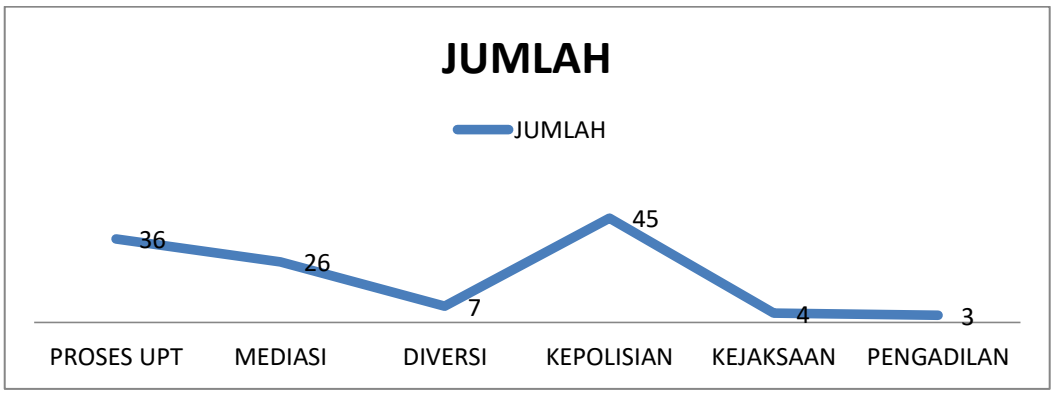

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

4. Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Sampai dengan akhir Tahun 2019 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebesar 121 Kasus. Dengan 28 Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan 93 Kasus Kekerasan terhadap anak.

Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak merupakan pengukuran kinerja realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka diperoleh realisasi capaian berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{Target - Realisasi}{Target} x\ 100\ \%$$

Sehingga diperoleh :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = 1 + \frac{130 - 121}{130} x\ 100\ \% = 106{,}92\ \%$$

Jumlah ini mengalami penurunan dari Tahun 2018 yaitu sebesar 138 Kasus yang terdiri dari 86 kasus kekerasan anak dan 52 kasus kekerasan orang dewasa atau perempuan.

Tabel 3.100 Data Terpilah Kekerasan terhadap perempuan di Tahun 2019

NO	BENTUK KEKERASAN	PEREMPUAN
1	KEKERASAN FISIK	4
2	KEKERASAN SEKSUAL	2
3	PSIKIS	6
4	PENELANTARAN	3
5	TRAFICKING	0
6	EKSPLOITASI	0
7	KDRT	2
8	LAINNYA	11
	JUMLAH	**28**

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Grafik 3.14 Kekerasan Terhadap Perempuan di Tahun 2019

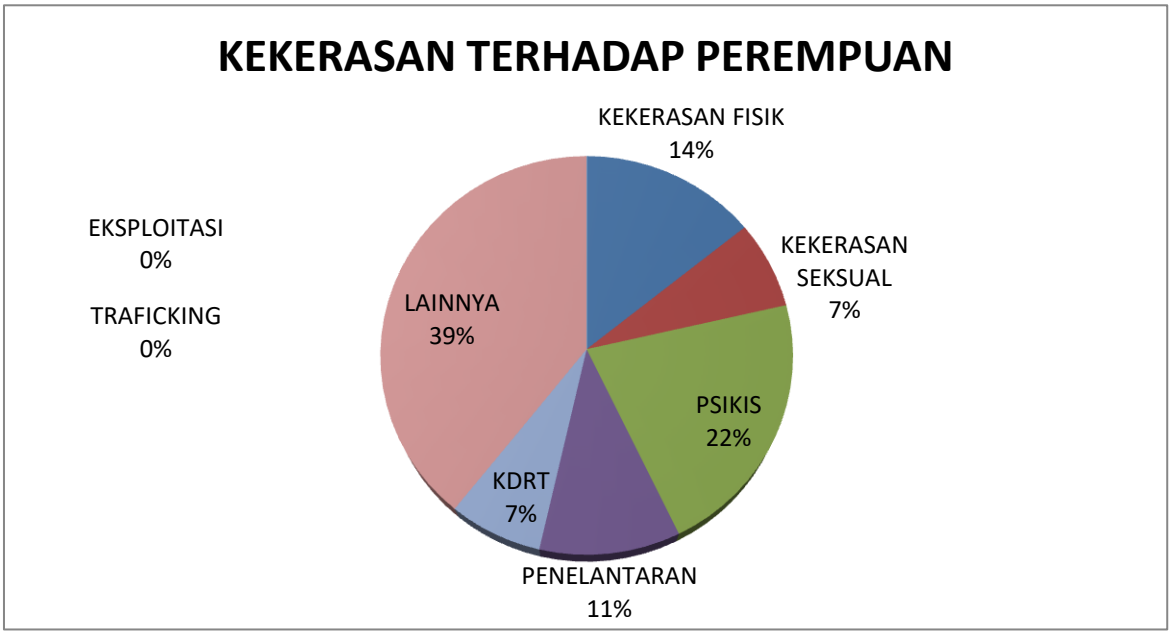

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Tabel 3.101 Data Terpilah Kekerasan terhadap anak di Tahun 2019

NO	BENTUK KEKERASAN	ANAK
1	KEKERASAN FISIK	16
2	KEKERASAN SEKSUAL	30
3	PSIKIS	16
4	PENELANTARAN	5
5	TRAFICKING	0
6	EKSPLOITASI	0
7	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM :	
	A. PERSETUBUHAN	4
	B. LAKA LANTAS	6
	C. NARKOBA	1
	D. PENCURIAN	1
8	KDRT	0
9	LAINNYA	14
	JUMLAH	**93**

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Grafik 3.15 Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2019

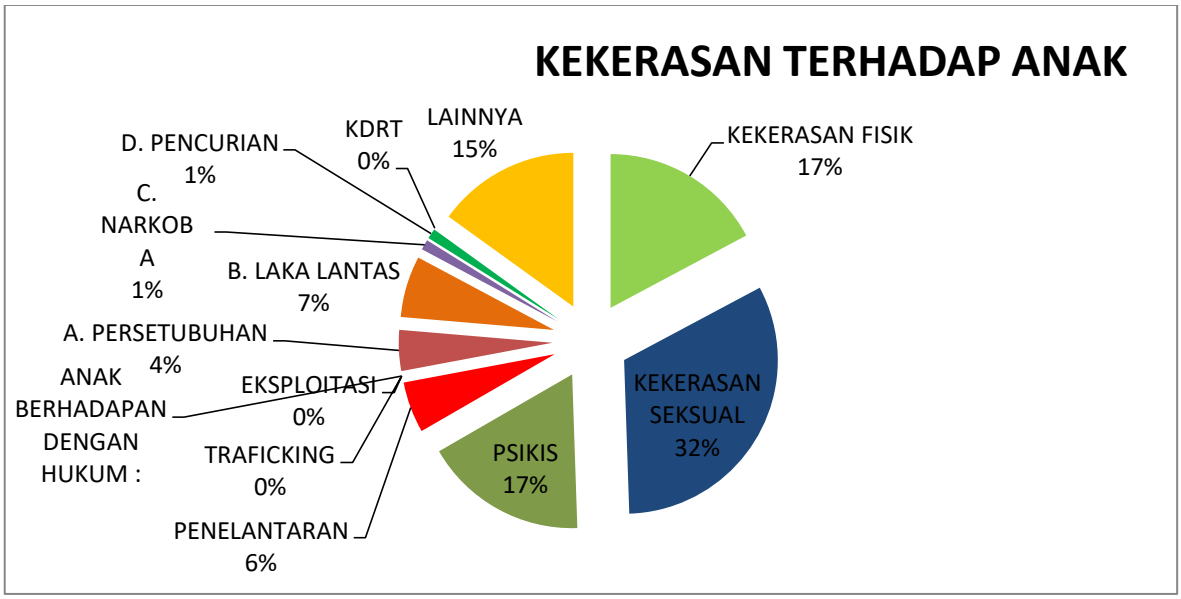

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019

Bila dilihat perbandingan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dari tahun 2018, Tingkat kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dari 52 kasus menjadi 28 kasus pada Tahun 2019 atau turun 42,30%, namun Kasus Tindak Kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan sebesar 7 kasus, dari 86 kasus ditahun 2018, menjadi 93 kasus di tahun 2019.

Tabel 3.102 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 29 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2021
1.	IPG	Persen	61,89	62,20	62,57	78,83	90,00
2.	IDG	Persen	54,86	56,65	56,44	56,44	59,17
3.	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Pertugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	Persen	76,85	84,73	95,65	98,35	100
4.	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Kasus	108	131	138	121	90

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 3.103 Program dan Anggaran Sasaran 29 Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	969.181.200,00	947.079.628,00	97,72
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	200.000.000,00	198.100.000,00	99,05
3.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	350.000.000,00	333.807.881,00	95,37
4.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.360.000.000,00	1.187.985.807,00	87,35
5.	Program Pemenuhan Hak – hak Anak	131.000.000,00	123.482.200,00	94,26
6.	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	250.000.000,00	222.541.300,00	89,02
TOTAL		**3.260.181.200,00**	**3.012.996.816,00**	**92,42**

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp. 3.012.996.816,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.260.181.200,00 atau 92,42%. Realisasi keuangan sebesar 92,42% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,39%, maka cukup efisien penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena penggunaan sumberdaya lebih kecil dari capaian kinerja, walau capaian kinerja belum tercapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya pencapaian sasaran antara lain:

1. Kurangnya tenaga ahli yang telah terlatih (bersertifikat), sebagai Narasumber untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak.

2. Minimnya dana yang tersedia, sehingga masih ada beberapa kecamatan dan desa yang belum diberikan sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak.
3. Perlu dibentuk satgas di masing-masing kecamatan dalam hal penanganan kekerasan anak dan perempuan
4. Masih kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, pengetahuan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Tidak tersedianya tempat Rehabilitasi Sosial Anak Korban Narkoba
6. Tidak tersedianya ruangan khusus pemeriksaan korban dirumah sakit
7. Rendahnya angka IPG (Indeks Pembanguan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) kerena belum terujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal dan kurangnya Perempuan sebagai pelaku ekonomi.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.104 sebagai berikut:

Tabel 3.104 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka	101,18	637.234.902.050,00	566.729.796.472,00	88,94	Efisien
2.	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	89,45	110.732.113.845,21	72.943.869.304,00	65,87	Tidak Efisien
3.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	102,76	14.096.414.325,00	13.704.960.408,00	97,22	Efisien
4.	Optimalnya pengendalian penduduk danpelayanan keluarga berencana	103,36	8.641.073.000,00	6.661.843.606,00	77,10	Efisien
5.	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	146,97	23.667.306.300,00	20.837.102.233,00	88,04	Efisien

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
6.	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	93,25	236.836.146.481,00	202.624.425.856,00	85,55	Tidak Efisien
7.	Meningkatnya budaya baca masyarakat	135,88	1.655.000.000,00	1.367.706.880,00	82,64	Efisien
8.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	101,76	227.934.707.294,00	182.807.303.340,00	80,20	Efisien
9.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	95,91	2.413.189.200,00	2.003.116.785,00	83,01	Tidak Efisien
10.	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	166,42	41.239.879.760,00	38.545.023.052,00	93,47	Efisien
11.	Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	104,96	4.318.888.752,00	3.640.946.777,00	84,30	Efisien
12.	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	129,09	9.581.707.725,00	7.685.174.833,00	80,21	Efisien
13.	Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	-122,62	1.500.000.000,00	1.324.126.400,00	88,28	Tidak Efisien
14.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1224,82	1.148.003.188,00	1.005.990.984,00	87,63	Efisien
15.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	743,70	6.842.622.500,00	5.336.703.327,00	77,99	Efisien
16.	Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	608,70	-	-	-	Efisien
17.	Meningkatnya produktivitas, tata kelola,dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	51,84	108.079.858.499,00	84.266.801.380,00	77,97	Tidak Efisien
18.	Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	151,45	23.580.599.699,00	15.902.223.680,00	67,44	Efisien
19.	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	72,33	4.247.691.314,00	2.406.685.645,00	56,66	Tidak Efisien
20.	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	97,83	2.394.285.755,97	1.935.027.255,00	80,82	Tidak Efisien
21.	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	45,00	7.820.374.166,00	6.559.516.993,00	83,88	Tidak Efisien
22.	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	29,16	3.441.637.000,00	2.036.985.185,00	59,19	Tidak Efisien

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
23.	Meningkatnya interkoneksitas antar wilayah	101,16	958.043.120.764,58	811.913.815.805,00	84,75	Efisien
24.	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	123,47	38.124.838.818,00	36.117.325.318,00	94,73	Efisien
25.	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	103,90	4.315.324.553,11	3.031.958.755,00	70,26	Efisien
26.	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	94,93	117.406.378.000,00	105.581.995.501,00	89,93	Tidak Efisien
27.	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	108,18	9.120.302.105,00	5.429.643.715,00	59,53	Efisien
28.	Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	152,44	19.646.169.875,00	17.584.251.087,00	89,50	Efisien
29.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	99,39	3.260.181.200,00	3.012.996.816,00	92,42	Tidak Efisien
	JUMLAH	**174,37**	**2.627.322.716.169,87**	**2.222.997.317.392,00**	**84,61**	**Efisien**

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 sebanyak 466 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 974.047.114.758,00 dan total setelah ditetapkan HPS turun menjadi sebesar Rp. 933.051.658.271,12, dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran turun menjadi sebesar Rp. 910.106.453.216,52 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 22.945.205.054,60 atau sebesar 3% dari total HPS.

No.	HPS	Realisasi	Selisih	Efisiensi
1.	933.051.658.271,12	910.106.453.216,52	22.945.205.054,60	3%

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah Propinsi Kalimantan Timur

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor 7 00/2050/SAKIP-Kab-Kota/XI/2019 tanggal 14 November 2019 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara., telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018, dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait **Perencanaan Kinerja**

1. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra Tahun 2016-2021 agar dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target yang merupakan representasi dari indikator sasaran strategis dan target tahun terakhir dalam periode RPJMD/Renstra.

   Rencana Aksi :

   Pada tahun 2019 dilakukan evaluasi dan perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Kemudian dilanjutkan perubahan Rencana Strategis (Renstra) seluruh perangkat daerah khususnya yang memuat target kinerja indikator sasaran pada seluruh perangkat daerah.

   Dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, terdapat perubahan Sasaran dan IKU Kabupaten Kutai kartanegara, yang semula 29 Sasaran dengan 48 Indikator, menjadi 15 Sasaran dengan 18 Indikator, sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2. Indeks Persepsi Korupsi
3.	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	3. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan mayarakat	4. Rata-Rata Lama Sekolah
		5. Harapan Lama Sekolah
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6. Angka Harapan Hidup
6.	Menurunkan jumlah pengangguran	7. Tingkat Pengangguran Terbuka

7.	Meningkatnya pengentasan kemiskinan	8.	Persentase tingkat Kemiskinan
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	9.	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi
9.	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	10.	Tingkat Pertumbuhan PAD
10.	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	11.	PDRB sektor pertanian (Pertumbuhan Sektor Pertanian)
11.	Meningkatnya daya dukung sektorpariwisata dan budaya daerah	12.	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
12.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	13.	Indeks Gini
13.	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	14.	Cakupan aksesibilitas antar wilayah
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15.	Status pencemaran air sungai
		16.	Status pencemaran udara
		17.	Tutupan Lahan
15.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	18.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Menyusun/ membuat IKI (Indikator Kinerja Individu) sampai pada level staf/pelaksana, untuk menggambarkan tugas, fungsi dan kinerjanya.

   Rencana Aksi :

   Telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan ke perangkat daerah, terkait pembuatan IKI (Indikator Kinerja Individu) sampai pada level staf/ pelaksana, dengan berpatokan pada matrik Pemetaan Penjabaran Tupoksi, Perhitungan Beban Kerja Dan Pendistribusian Tugas Jabatan Pelaksana sesuai dengan tugas, fungsi dan kinerjanya.

b. Rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait **Pengukuran Kinerja**

1. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment, sehingga dapat menumbuhkan budaya kerja pada aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

   Rencana Aksi :

Perubahan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP PNS) masih dalam tahap penyempurnaan/ penyusunan. TPP PNS diberikan dari berdasarkan golongan/pangkat menjadi berdasarkan nama jabatan hasil analisa jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan, walau masih dengan persentase 80% kehadiran dan 20% kinerja. Untuk Perbup TPP PNS perubahan masih dalam pembahasan dengan rencana penerapannya 60% kehadiran dan 40% kinerja. TPP PNS diberikan pengurangan atau punishment terhadap pegawai yang tidak hadir, terlambat, mendahului pulang, pegawai meninggalkan tempat tugas bukan untuk kepentingan dinas tanpa izin atasan, keterlambatan pelaporan LHKPN dan LHKASN dengan pemberian sanksi penundaan pembayaran TPP.

c. Rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait **Pelaporan Kinerja**

1. Meningkatkan kualitas laporan kinerja Kabupaten dan sebagian PD, khususnya dalam hal penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan oleh pimpinan secara berjenjang untuk umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

   Rencana Aksi :

   - Mengikuti Diklat Penyusunan LKjIP yang dilaksanakan oleh UGM, kemudian pengetahuan yang didapat disampaikan ke perangkat daerah, untuk peningkatan kualitas laporan.
   - Menyajikan data efisiensi penggunaan sumber daya di setiap sasaran dalam laporan kinerja.
   - Format pelaporan kinerja sebagai acuan penyusunan LKjIP perangkat daerah akan dievaluasi dan disempurnakan, dan disampaikan bukan hanya dalam bentuk surat, tetapi melalui pendampingan secara langsung.

d. Rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait **Pelaporan Kinerja**

1. Pengukuran , rencana aksi pada level PD dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala.

   Rencana Aksi :

   Sedang dalam tahap uji coba “Aplikasi e-Pantau” yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu aplikasi yang bertujuan untuk pengukuran kinerja perangkat daerah, melalui pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah, dan dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala.

2. Memerintahkan kepada lnspektorat untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap PD, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja, pencapaian manajemen kinerja secara berkelanjutan dan dapat ditindaklanjuti PD.

   Rencana Aksi :

   Telah dilakukan diskusi dengan Inspektur Daerah, terkait langkah – langkah kedepan, menindaklanjuti rekomendasi diatas, serta rencana pelaksanaan evaluasi SAKIP dilaksanakan di semua perangkat daerah. sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja, pencapaian manajemen kinerja secara berkelanjutan dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

BAB IV

PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 yang terdiri dari 29 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1. Rekapitulasi Capaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Rata-rata Capaian
1	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	1	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,3800	3,2912 (Data Sementara)	97,37%	101,18%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00 (sangat baik)	88,075	106,11%	
		3	Indeks Partisipasi Masyarakat	83.00 (Sangat Baik)	83,06	100,07%	
2	Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	4	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	89,45%
		5	Indek Persepsi Korupsi	6.3	5,56	88,25%	
		6	Predikat Akuntabilitas Kinerja	81	64,89	80,11%	
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	7	Cakupan e-KTP	96%	98,65	102,76%	102,76%
4	Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	8	Peserta KB Aktif	73,91%	76,4	103,36%	103,36%
5	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	9	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk	148	70,89	152,10%	146,97%
		10	Indeks Risiko Bencana	130	75,6	141,84%	

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Rata-rata Capaian
6	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	11	Angka Harapan Lama Sekolah	14,89	13,57	91,13%	93,25%
		12	Rata-Rata Lama Sekolah	9.27	8,84	95,36%	
7	Meningkatnya budaya baca masyarakat	13	Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan	3,93%	5,34%	135,88%	135,88%
8	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	14	Angka Harapan Hidup	71,72	72,21	100,68%	101,76%
		15	Angka Kematian Ibu Melahirkan	25	24	104,00%	
		16	Angka Kematian Bayi	168	167	100,59%	
9	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	17	Rasio Kesempatan Kerja	0,98	0,94	95,91%	95,91%
10	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	18	Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri	4%	10,54%	263,50%	166,42%
		19	Indeks Pembangunan Olah Raga (Sport Development Index)	60%	41,60%	69,33%	
11	Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	20	Jumlah Desa Berketahanan Sosial	150	228	152,00%	104,96%
		21	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal	60%	44,40%	74,00%	
		22	Indeks Kemandirian Desa	0,72	0,64	88,89%	
12	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	23	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	55%	71%	129,09%	129,09%
13	Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	24	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,41	0,95	-31,71%	-122,62%
		25	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,03	0,19	-433,33%	
		26	Cakupan Rumah Layak Huni	92,12	89,53	97,18%	

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Rata-rata Capaian
14	Meningkatnya daya saing investasi daerah	27	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	5,6%	68,59	1224,82%	1224,82%
15	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	28	Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)	8,97%	66,71%	743,70%	743,70%
16	Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	29	Cakupan Fasilitasi CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)	10%	60,87%	608,70%	608,70%
17	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	30	Pertumbuhan sektor pertanian	9,24%	4,79%	51,84%	51,84%
18	Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	31	Pertumbuhan sektor pariwisata	7,89%	11,95	151,45%	151,45%
19	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	32	Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya	3%	2,17%	72,33%	72,33%
20	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	33	Persentase koperasi aktif	81,23%	81,85%	100,76%	97,83%
		34	Pertumbuhan UMK Naik Kelas	3,13%	2,97%	94,89%	
21	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	35	Pertumbuhan Eksport Bersih Non Migas dan Batu Bara	9%	4,05%	45,00%	45,00%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Rata-rata Capaian
22	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	36	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	7,03%	2,05%	29,16%	29,16%
23	Meningkatnya interkoneksitas antar wilayah	37	Persentase jalan dengan kondisi baik	86,8%	87,81%	101,16%	101,16%
24	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	38	Cakupan aksesbilitas antar wilayah	75,00%	92,60%	123,47%	123,47%
25	Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	39	Cakupan koneksi internet Kecamatan/Desa/Kel	80%	83,12%	103,90%	103,90%
26	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	40	Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	1 Kawasan	1 Kawasan	100,00%	94,93%
		41	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	0%	0,006%	99,40%	
		42	Persentase cakupan layanan air minum Rumah Tangga	100%	85,39%	85,39%	
27	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	43	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,00	77,89	108,18%	108,18%
28	Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	44	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan.	3,89%	5,93	152,44%	152,44%

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Rata-rata Capaian
29	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	45	IPG	86%	79,14%	92,02%	99,39%
		46	IDG	56,29%	56,44%	100,27%	
		47	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh pertugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	98,35%	98,35%	
		48	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	130 (-15%)	121	106,92%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Capaian kinerja ≥ 85 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 24 sasaran, atau 82,76%;
b) Capaian kinerja 70 s/d <85% kategori “berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 3,45%;
c) Capaian kinerja 55 s/d <70% kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
d) Capaian kinerja 55% kategori “kurang berhasil” sebanyak 4 sasaran, atau 13,79%

Adapun prestasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2018 sebanyak 10 Prestasi Tingkat Provinsi dan Nasional, sebagaimana terlampir.

Lampiran

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019

1. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA RAIH 7 PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PADA HUT KALTIM KE - 62 :
   a. BIDANG KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KATEGORI KABUPATEN.
   b. BIDANG PEMBANGUNAN HORTIKULTURA.
   c. BIDANG PERKEBUNAN.
   d. BIDANG TATA KELOLA KEARSIPAN.
   e. BIDANG KWARTIR CABANG TERGIAT.
   f. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KATEGORI KABUPATEN.
   g. BIDANG PARIWISATA KATEGORI KABUPATEN.

2. LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS PEMERINTAH (LHE AKIP) 2018 DENGAN PREDIKAT B DARI KEMENTERIAN PAN dan RB

3. PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2019 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4. KUKAR RAIH PENGHARGAAN TERKAIT OPINI PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TA 2019.

5. KUKAR RAIH PREDIKAT WTP DARI BPK RI

6. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KUKAR RAIH PENGHARGAAN TERBAIK DARI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI).

7. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KUKAR RAIH PENGHARGAAN TERBAIK I DALAM RANGKA PEMILIHAN LKD TERBAIK SE-KALTIM.

8. RSUD AM PARIKESIT RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI ROLE MODEL PELAYANAN PUBLIK TERBAIK KATEGORI PELAYANAN PRIMA.

9. SEKOLAH DASAR NEGRI 007 KECAMATAN MUARA JAWA RAIH PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019.

Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK. 1037 /MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

Memberikan Penghargaan Kepada :

SDN 007 MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2019

PENGHARGAAN INI BERLAKU SELAMA 4 TAHUN

Jakarta, 6 Desember 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KUKAR RAIH PENGHARGAAN AWARD BIDANG INOVASI INDUSTRI 2019.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Tenggarong, 23 Maret 2020

Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT

H. HERIANSYAH, SE.,M.Si

PEMBINA

NIP. 19790801 200112 1 001